



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2024**

PROVINSI GORONTALO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RKPD Rancangan Akhir Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Rancangan Renja Tahun 2024 ini memuat program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan juga prakiraan maju tahun berikutnya.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) , Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya



disingkat dengan RKPD Rancangan Akhir Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kumperindag Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2024 dan juga prakiraan maju tahun 2024. Dokumen ini juga memberi gambaran tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai dengan indikasi anggaran dan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran dari hasil pelaksanaan pada tahun yang lalu. Penyusunan Renja Tahun 2024 diharapkan efektifitas dan efisiensi kerja dapat lebih dioptimalkan.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Rneja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan dokumen ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini, Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan pikirannya.

Gorontalo, Juli 2023

KEPALA DINAS

RISJON SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 196909241989021001



DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	82
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	85
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024	91
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	100
Bab III Tujuan Sasaran Perangkat Daerah	107
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	107
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	113
3.3. Program dan Kegiatan	114
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	123
Bab V Penutup	128

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Program & Kegiatan beserta realisasi Keuangan Tahun 2022	13
Tabel 2.2.	Indikator Sasaran Diskumperindag Prov. Gorontalo Tahun 2022	17
Tabel 2.3.	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	18
Tabel 2.4.	Data Perkembangan Koperasi 2018-2022	19
Tabel 2.5.	Data Keragaan Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2022	20
Tabel 2.6.	Data Perkembangan Usaha Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2022	21
Tabel 2.7.	Realisasi KUR Per Sektor Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2022	27
Tabel 2.8.	Rekap Data UMKM Tahun 2018-2022	32
Tabel 2.9.	Perkembangan IKM Tahun 2017 - 2021	39
Tabel 2.10.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	66
Tabel 2.11.	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	83
Tabel 2.12.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	98
Tabel 2.13.	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	102
Tabel 3.1.	Perbandingan Jumlah Program Kegiatan dan Anggaran 2023.....	116
Tabel 3.2.	Perbandingan Program Kegiatan dan Anggaran RKPD & Renja 2024	116



Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2024 dan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD 2026 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 118
-----------	--	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, atau penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang memuat seluruh target sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya.

Dalam penyusunannya diarahkan untuk mencapai visi misi OPD, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Renja Dinas Kumperindag berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun



berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang sebelumnya disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPD digunakan sebagai acuan pembangunan mengingat pada periode setelah 2024 Provinsi Gorontalo tidak mempunyai kepala daerah terpilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah, karena menunggu waktu Pilkada Serentak Tahun 2024. Perbedaan yang signifikan antara RPD dan RPJMD adalah pada RPD tidak memuat Visi dan Misi serta jangka waktu pelaksanaan rencana pembangunan yang hanya 4 tahun. RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2023-2026 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dibentuk



berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Peraturan Gubernur ini menyebutkan bahwa Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo;
6. Pengelolaan barang milik Negara/daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo;
7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan.



Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kumperindag diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Pada rancangan awal rencana kerja ini telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2022 (tahun n-2) serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2023 (tahun n-1). Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan baik di Gorontalo maupun nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan urusan pemberdayaan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2024 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.

Rancangan Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja OPD dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di OPD. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintahan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 Disamping itu, penyusunan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 juga memperhatikan dokumen perencanaan tahunan Kementerian/Lembaga dan SKPD Kabupaten/Kota, yang meliputi:

1. Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI 2020-2024;
2. Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024; dan
3. Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024; serta
4. Renja SKPD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

Periode Keempat dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu



Gorontalo Maju Dan Mandiri. Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (*quality-sustainable growth*).

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
8. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



22. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03).
26. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
27. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
28. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2024.

Adapun maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan bagi peemrintah dan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan Kumperindag di Provinsi Gorontalo dan



menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber pendanaan baik APBD, maupun sumber-sumber lainnya.

2. Menjadi dasar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
3. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester dan tahunan pembangunan Kumperindag di provinsi Gorontalo.
4. Menjadi sarana untuk mengukur tingkat capaian sasaran program dan kegiatan SKPD dalam mendukung pencapaian sasaran RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Renstra Diskumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.
5. Menjadi alat koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan prioritas dan sasaran program dan kegiatan lintas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat serta pelaku usaha, masyarakat, organisasi profesi, LSM, perguruan tinggi, lembaga donor selaku pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Diskumperindag Provinsi Gorontalo yang tercantum dalam Renstra Diskumperindag periode 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kumperindag Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, yang meliputi Sub Bab *Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan* serta *Sistematika Penulisan*.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022,

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain *Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kumperindag Tahun 2022 dan Capaian Renstra 2017-2022 Dinas Kumperindag, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;*

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Bab ini diawali dengan kajian kebijakan nasional yang mempengaruhi pencapaian pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD, kajian terhadap isu-isu penting yang mendasari perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD, yang meliputi Sub Bab *Telaahan terhadap*



Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V PENUTUP, Bab ini menguraikan catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KUMPERINDAG TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kumperindag Tahun 2022 dan Capaian Renstra 2017-2022 Dinas Kumperindag

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai *input* dengan *output*.

Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan Penetapan Kinerja yang ada dalam Sasaran Strategis pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.

RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 yang menggambarkan arahan kebijakan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Gorontalo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Berdasarkan Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi awal sebesar



Rp. 26.207.354.748,- dan setelah perubahan total pagu anggaran 2022 sebesar **Rp. 38.167.659.012,-** (tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua belas rupiah) Melaksanakan 11 program, 18 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan Realisasi Fisik 98,13 % dan Realisasi Keuangan 94,78%. Adapun program dan kegiatan beserta realisasi keuangan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Program dan Kegiatan beserta Realisasi Keuangan Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2022	FISIK		KEUANGAN	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
URUSAN KOPERASI DAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	23.229.565.427	100	99,33	100	98,38
BIDANG KOPERASI	20.967.608.624	100	98,99	100	97,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.606.181.924	100	96	100	93,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.039.901.853,00	100	100	100	98,72
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.525.980.406,00	100	100	100	96,69
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.001,00	100	100	100	99,09
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.106.160.962,00	100	86,27	100	85,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.569.482.702,00	100	99,49	100	93,88
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	214.656.000,00	100	100	100	98,17
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	331.539.238	100	100	100	99,80
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan,	331.539.238,00	100	100	100	99,8



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2022	FISIK		KEUANGAN	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat					
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	404.017.104	100	100	100	99,92
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	404.017.104,00	100	100	100	99,92
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.625.870.358	100	100	100	98,57
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.625.870.358,00	100	100	100	98,57
BIDANG UKM	2.261.956.803,00	100,00	100,00	100,00	99,26
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.943.329.233	100	100	100	99,64
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					
Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	1.943.329.233,00	100	100	100	99,64
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	318.627.570	100	100	100	98,88
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	318.627.570,00	100	100	100	98,88
URUSAN PERDAGANGAN	11.022.150.109		299		289
	9.057.702.652	100	99,28	100	94,62
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	8.773.572.239	100	99,97	100	93,85



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2022	FISIK		KEUANGAN	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.684.927.048,00	100	100	100	93,85
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	88.645.191,00	100	97,34	100	94,19
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	284.130.413	100	98,59	100	95,38
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					
Pameran Dagang Internasional/Nasional	284.130.413,00	100	98,59	100	95,38
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.964.447.457	100	100	100	99,37
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.127.308.103,00	100	100	100	99,81
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					
Pengembangan Layanan Pengujian	445.274.499,00	100	100	100	99,26
Pengembangan Layanan Sertifikasi	273.933.136,00	100	100	100	97,5
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	117.931.719,00	100	100	100	99,98
URUSAN INDUSTRI	3.915.943.476	100	100	100	96,04
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.760.598.076	100	100	100	94,02
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2022	FISIK		KEUANGAN	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	251.852.183,00	100	100	100	90,97
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	876.168.575,00	100	100	100	99,02
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.157.566.939,00	100	100	100	91,19
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	475.010.379,00	100	100	100	99,3
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	155.345.400	100	100	100	98,05
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	155.345.400,00	100	100	100	98,05
Jumlah	38.167.659.012	100	98,13	100	94,78

Dari tabel 2.1 dapat disampaikan realisasi keuangan dari 11 program, 18 kegiatan, 23 sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 mencapai 94,78% realisasi keuangan dan realisasi fisik 98,13%. Realisasi fisik & Keuangan terendah ada pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (fisik 95,97% dan keuangan 93,46%) dengan sisa anggaran Rp. 1.152.066.054,- dari pagu Rp. 17.606.182.924,- (ketidakcapaian ini karena adanya beberapa item belanja yang tidak terealisasi antara lain sisa belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 315.766.746,- dan item belanja kendaraan bermotor (mobil listrik yang teranggarkan melalui DID periode 2) senilai Rp. 700.000.000,- tidak terealisasi karena untuk harga mobil listrik untuk operasional dinas masih menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk dirilis harganya sehingga belum dapat dicantumkan harganya pada E-Katalog sehingga proses pengadaannya tidak terlaksana hingga 31 Desember 2022)



Sedangkan capaian tertinggi yaitu pada program pemberdayaan dan perlindungan koperasi (realisasi fisik 100% dan keuangan 99,92%) sub kegiatan perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, stnadarisasi dan restrukturisasi usaha dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,92% (silva Rp. 334.780,-)

Sedangkan indikator kinerja sasaran untuk urusan kumperindag, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 : Indikator Sasaran Diskumperindag Prov. Gorontalo Tahun 2022

INDIKATOR SASARAN	2022		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase Koperasi Sehat	10%	34,38%	343,8%
Rata-Rata UKM Naik Kelas	50 UKM	66 UKM	132%
Jumlah Penumbuhan IKM	50 IKM	212 IKM	424%
Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	2.15%	0,19%	8,84%
Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

• *Hasil yang diperoleh berdasarkan kompilasi data yang diperoleh dari Badan Statistik Provinsi Gorontalo dan Dinas Kumperindag

Dari tabel 2.2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa indikator sasaran Diskumperindag Provinsi Gorontalo rata-rata termasuk kategori baik diatas 100%.

Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan perkiraan pelaksanaan program tahun berjalan 2022, menunjukkan adanya peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan program tahun 2022 dan progres 2023 dilakukan terhadap indikator kinerja hasil program sebagai berikut:



Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022 Dinas
Kumperindag Provinsi Gorontalo

No	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Realisasi
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	7 Dok	12 Dok
		Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk dan dilatih	1 satgas (prov)	1 satgas (prov)
		Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10 Koperasi	20 Koperasi
		Jumlah pemeriksaan KSP/USP	10 Koperasi	12 Koperasi
2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi Aktif	728 Kop	985 Kop
		Jumlah Koperasi berkualitas	10 Kop	20 Kop
		Jumlah Koperasi berprestasi	10 Kop	20 Kop
3.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi & UMKM yang Mengakses Permodalan	1500 KUKM	4867 KUKM
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas	50 UKM	75 UKM
5	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas	50 UKM	75 UKM
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%
7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang di bina	15.339 IKM	15.767 IKM
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Sistem Informasi IKM	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah perdagangan antar pulau	3600 kali	4033 kali
10	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor*	10 Komoditi	11 Komoditi
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang	3 sertifikat	12 sertifikat

Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada 11 (sebelas) program di tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan lebih dari 100% capaian.



Jumlah koperasi Aktif. Adapun target yang ditetapkan di akhir periode RPJMD sebanyak 728 koperasi aktif. Untuk jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebanyak 985 koperasi dari target 728 koperasi. Adapun untuk capaian tahun 2021 adalah sebanyak 957 koperasi aktif dengan target sebanyak 708 Koperasi aktif. Jumlah koperasi aktif ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun data keragaan koperasi tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Data Perkembangan Koperasi 2018 - 2022

N O	U R A I A N	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Koperasi (Unit)	1.282	1.304	1.337	1387	1414
	- Koperasi Aktif (unit)	840	866	907	957	985
	- Koperasi Tidak Aktif (unit)	442	438	430	430	429
	- RAT Koperasi (unit)	252	245	227	221	252
2.	Jumlah Anggota (Org)	140.874	138.627	140.296	142.713	146.977
3.	Total Asset (Rp. 000)	478.598.338	477.904.376	517.257.795	551.366.521	572.374.634
	- Modal Sendiri	230.562.545	230.906.015	269.839.272	306.039.971	333.383.296
	- Modal Luar	220.738.144	205.005.923	208.706.686	209.392.718	218.373.188
4.	Volume Usaha (Rp. 000)	375.350.749	370.439.880	398.344.178	414.931.109	414.951.877
5.	SHU (Rp. 000)	25.513.205	26.152.270	28.632.564	28.393.614	30.508.386

Sumber : Online Data System

Tahun 2022 persentase koperasi tidak aktif sebesar 31 persen terhadap total jumlah koperasi. Begitupun untuk koperasi yang telah melaksanakan RAT sebesar 25,59 persen terhadap jumlah koperasi aktif ditahun 2022. Untuk jumlah koperasi yang melaksanakan RAT ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Hal ini karena adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo khususnya Diskumperindag Provinsi Gorontalo antara lain adanya program bedah koperasi (revitalisasi koperasi), kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi di kabupaten/kota. Di tahun 2022 revitalisasi koperasi berjumlah 6 (enam) koperasi yaitu :

- a. Kopwan Ilomata Desa ilomata Kecamatan Atinggola. Kab. Gorontalo Utara



- b. Koperasi Produsen Bandayo Ar-Rahman Moosalamati, ds. pilohayanga. Kec. Telaga. Kabupaten Gorontalo
- c. Koperasi Pertanian Motongolito, Kecamatan Bongomeme. Kab. Gorontalo
- d. Koperasi Produsen Puncak Nawacita, Desa Lito. Kec. Paguyaman Pantai. Kab. Boalemo
- e. Koperasi Makmur Bersama Kapet, desa Harapan. Kec. Wonosari. Kab. Boalemo
- f. Koperasi Produsen Simanagi Cahaya Abadi, Desa Siduwonge. Kec. Randangan. Kabupaten Pohuwato

Adapun untuk Jumlah koperasi aktif tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 28 Koperasi atau naik 2,93 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun untuk pertumbuhan koperasi naik sebesar 1,95% dibandingkan tahun 2022. Untuk target akhir periode RPJMD sebanyak 728 koperasi aktif telah dicapai. Untuk jumlah koperasi tidak aktif terbanyak terdapat di Kota Gorontalo sebanyak 145 koperasi atau sebesar 33,8 persen terhadap jumlah koperasi tidak aktif se-Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5. Data Keragaan Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2022

No.	Kabupaten / Kota	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Total Kop	Anggota (orang)			R A T (unit)	Tenaga Kerja
					L	P	Jlh		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTA GORONTALO	187	145	33	20.848	20.293	41.141	93	478
2	KAB. GORONTALO	351	76	427	26.337	18.681	45.018	67	1101
3	KAB. BOALEMO	92	61	153	9626	5487	15113	14	235
4	KAB. POHUWATO	101	37	138	6608	3817	10425	18	68
5	KAB. BONE BOLANGO	103	57	160	11361	5111	16322	31	283
6	KAB. GORONTALO UTARA	90	40	130	6333	5088	11421	15	213
7	PROV. GORONTALO	61	13	74	3139	1836	4975	14	184
	JUMLAH	985	429	1414	84252	60313	144415	252	2562

Sumber : Online Data System



Tabel 2.6. Data Perkembangan Usaha Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Total Asset (Rp.000)	M. Sendiri (Rp 000)	M. LUAR (Rp. 000)	VOL USAHA (Rp. 000)	S H U (Rp 000)
1	2	16	17	18	19	20
1	KOTA GORONTALO	147.549.658	99.039.813	56.661.422	124.182.051	13.022.165
2	KAB. GORONTALO	213.439.372	136.292.666	77.146.706	194.698.988	8.365.319
3	KAB. BOALEMO	57.196.670	10.871.284	44.536.563	21.600.037	382.877
4	KAB. POHUWATO	29.919.849	4.612.603	6.054.371	15.926.746	1.055.704
5	KAB. BONE BOLANGO	59.203.625	30.120.565	20.591.855	30.537.301	4.718.304
6	KAB. GORONTALO UTARA	25.585.558	23.882.579	6.702.979	14.106.207	1.645.715
7	PROV. GORONTALO	39.479.902	28.563.786	6.679.292	13.900.547	1.318.302
	JUMLAH	572.374.634	333.383.296	218.373.188	414.951.877	30.508.386

Sumber : Online Data System

Dari sisi permodalan (modal sendiri) mengalami kenaikan sebesar 8,94% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah Rp. 306.039.971,- begitupun untuk jumlah asset mengalami kenaikan juga sebesar 3,81 persen dan untuk volume usaha mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah Rp. 414.931.109-

Pada tahun 2022, upaya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dilakukan melalui pembinaan kepada Pengurus, Pengawas Koperasi serta Koperasi pengelola dan anggota Koperasi. Adapun aktifitas kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu :

Forum Koordinasi Akses Pembiayaan tahun 2022, dilaksanakan di 6 Kab/Kota se Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta 90 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi permasalahan terhadap Koperasi dan UKM dalam hal akses pembiayaan serta sebagai media koordinasi dan konsolidasi dengan Pihak Perbankan dan Pegadaian untuk mempercepat realisasi pinjaman melalui Program KUR, LPDB dan UMI.

Pemberian Penghargaan atau hadiah kepada Koperasi Sehat Kepatuhan, yang telah dinilai yang dianggap mampu mengembangkan Koperasi



dan telah melaksanakan kewajiban sebagai suatu badan hukum koperasi melalui pelaksanaan RAT Koperasi, dengan total hadiah sebesar Rp.150.000.000,- dengan 15 Koperasi penerima masing-masing koperasi sebesar 10 juta rupiah.

Rapat Koordinasi Permodalan tahun 2022, dilaksanakan di Provinsi Gorontalo sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 60 orang. Kegiatan ini sebagai media koordinasi dan konsolidasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo, Kab/Kota serta Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dengan Pendamping KUKM dalam rangka mencari solusi permasalahan terhadap akses pembiayaan

Kegiatan Pembinaan dan Bedah Koperasi yang di ikuti 30 anggota koperasi kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, Oktober dan November tahun 2022

Kegiatan FGD Peningkatan Kualitas SDM dan Penataan Kelembagaan Koperasi yang di ikuti 150 orang yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada bulan November tahun 2022

Revitalisasi Koperasi (Bedah Koperasi)

Di tahun 2022 revitalisasi koperasi berjumlah 6 (enam) koperasi yaitu

- Kopwan Ilomata Desa ilomata Kecamatan Atinggola. Kab. Gorontalo Utara
- Koperasi Produsen Bandayo Ar-Rahman Moosalamati, ds. pilohayanga. Kec. Telaga. Kabupaten Gorontalo
- Koperasi Pertanian Motongolito, Kecamatan Bongomeme. Kab. Gorontalo
- Koperasi Produsen Puncak Nawacita, Desa Lito. Kec. Paguyaman Pantai. Kab. Boalemo
- Koperasi Makmur Bersama Kapet, desa Harapan. Kec. Wonosari. Kab. Boalemo
- Koperasi Produsen Simanagi Cahaya Abadi, Desa Siduwonge. Kec. Randangan. Kabupaten Pohuwato.



Kegiatan Pembinaan kepada Pengurus, Pengawas Koperasi serta Koperasi pengelola dan anggota Koperasi dilaksanakan di Kabupaten/Kota yaitu :

Kabupaten Gorontalo Utara :

- ~ Koperasi Perikanan Kramat Jaya Hutakalo, Desa Hutakalo Kec. Sumalata
- ~ Koperasi Papualangi Expres, Desa Papualangi Kec. Tolinggula

Kota Gorontalo :

- ~ Koperasi Produsen Berkah Mandiri Hulonthalo, Kel. Talumolo Kec. Dumbo Raya
- ~ Koperasi Konsumen Semoga Berkah Selalu, Kel. Donggala Kec. Hulonthalangi
- ~ Koperasi Konsumen Murni Lestari Sejahtera, Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana

Kabupaten Pohuwato

- ~ Koperasi Simpan Pinjam Al-Ihlas, Desa Soginti Kec. Paguat

Kabupaten Bone Bolango

- ~ Koperasi Produsen Multi Prima Jaya, Koperasi Produsen Multi Prima Jaya

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK).

Pelaksanaan 13 DIKLAT diikuti oleh 167 koperasi yang pesertanya dari pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dengan jumlah 390 peserta yang terdiri dari IV (empat) Angkatan yaitu sebagai berikut :

Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi :

Angkatan I : Pelaksanaan Tanggal 27 s.d 30 Mei 202

- | | | |
|--|------|---------|
| 1. Diklat Akses Permodalan Koperasi | : 30 | peserta |
| 2. Diklat Pemeriksaan Kesehatan Koperasi | : 30 | peserta |
| 3. Diklat Kompetensi Bagi Juru Buku Koperasi | : 30 | peserta |
| 4. Diklat Restrukturisasi Usaha Koperasi | : 30 | peserta |

Angkatan II : Pelaksanaan Tanggal 14 Juli s.d 17 Juli 2022

- | | | |
|------------------------------|------|---------|
| 1. Diklat Akuntansi Koperasi | : 30 | peserta |
|------------------------------|------|---------|



2. Diklat Dasar Koperasi : 30 peserta
Pelaksanaan Tanggal 17 s.d 20 Juli 2022

3. Diklat Manajemen Perkoperasian : 30 peserta

Angkatan III : Pelaksanaan Tanggal 27 s.d 30 Oktober 2022

1. Diklat Mekanisme Penyelenggaraan RAT (1) : 30 peserta

2. Diklat Akuntansi Koperasi : 30 peserta

3. Diklat Kewirausahaan Koperasi : 30 peserta

Angkatan IV : Pelaksanaan 31 Oktober s.d 03 November 2022

1. Diklat Mekanisme Pelaksanaan RAT (2) : 30 peserta

2. Diklat Akuntansi Koperasi Berbasis IT : 30 peserta

3. Diklat Pengawasan Koperasi : 30 peserta

Peningkatan Kapasitas SDM UMKM

pelaksanaan 11 kegiatan pelatihan Bagi Pelaku Usaha di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, dan kabupaten Pohuwato, dengan jumlah peserta sebanyak 330 peserta dan 1 (satu) diklat layanan hukum yang terdiri dari 1 (satu) angkatan yaitu :

Angkatan I : Pelaksanaan Tanggal 24 s.d 27 Mei 2022

1. Diklat Strategi Manajemen Pemasaran : 30 peserta

2. Diklat Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi UMKM : 30 peserta

3. Diklat Pengenalan Sistem Pembayaran Digital : 30 peserta

4. Diklat Membangun Mindset Wirausaha : 30 peserta

5. Diklat Sertifikasi Keamanan Pangan Bagi UMKM : 30

peserta

Pelaksanaan Tanggal 21 s.d 24 Juli 2022

1. Diklat Inovasi Packaging produk Bagi UMKM : 30 peserta

Pelaksanaan Tanggal 28 s.d 31 Oktober 2022

Diklat Sistem Jaminan Halal Bagi UMKM : 30 peserta

Pelaksanaan Tanggal 28 s.d 31 Oktober

Diklat Layanan Bantuan & Pendampingan Hukum : 30 peserta

Diklat Fotografi Produk bagi UMKM : 30 peserta



Diklat Strategi manajemen Pemasaran Produk UMKM : 30 Peserta

Diklat Mindset & manajerial Bisnis Bagi UMKM : 30

peserta

Diklat Teknik Pemasaran Digital bagi UMKM 30 Peserta

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian jumlah koperasi aktif di Provinsi Gorontalo.

Koperasi Berprestasi, pada tahun 2022 target kegiatan ini mencapai 200%. Sama halnya dengan capaian di tahun 2021 yang mencapai 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian kinerja kegiatan tahun 2022 yaitu antara lain:

- a. Rakor Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dengan peserta Pembina Koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawasan Koperasi Se-Provinsi Gorontalo berjumlah 30 Orang.
- b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo dan pengawasan/monev koperasi penerima bantuan/penghargaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kabupaten/Kota serta pemeriksaan KSP/USP dilakukan pada 12 Koperasi Primer Provinsi Gorontalo
- c. Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Koperasi yang menghasilkan laporan hasil pengawasan koperasi Se-Provinsi Gorontalo baik yang didanai APBD dan APBN (Satgas Pengawas Koperasi Se-Provinsi Gorontalo) sebanyak 42 laporan.
- d. Penilaian Koperasi Berprestasi, yang menghasilkan 20 koperasi berprestasi Se-Provinsi Gorontalo dan sebagai penerima penghargaan koperasi berprestasi

Jumlah Koperasi & UMKM yang Mengakses Permodalan, pada kegiatan peningkatan akses permodalan dan efektivitas bagi KUKM maka Realisasi penyaluran KUR yang dapat dicapai sebesar 4867 KUKM dari target yang ditetapkan sebesar 1500 KUKM ditahun 2022, berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Adapun kegiatan



yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- Forum Koordinasi Akses Pembiayaan tahun 2022, dilaksanakan di 6 Kab/Kota se Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta 90 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi permasalahan terhadap Koperasi dan UKM dalam hal akses pembiayaan serta sebagai media koordinasi dan konsolidasi dengan Pihak Perbankan dan Pegadaian untuk mempercepat realisasi pinjaman melalui Program KUR, LPDB dan UMI.
2. Pemberian Penghargaan atau hadiah kepada Koperasi Sehat Kepatuhan, yang telah dinilai yang dianggap mampu mengembangkan Koperasi dan telah melaksanakan kewajiban sebagai suatu badan hukum koperasi melalui pelaksanaan RAT Koperasi, dengan total hadiah sebesar Rp.150.000.000,- dengan 15 Koperasi penerima masing-masing koperasi sebesar 10 juta rupiah.
 3. Rapat Koordinasi Permodalan tahun 2022, dilaksanakan di Provinsi Gorontalo sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 60 orang. Kegiatan ini sebagai media koordinasi dan konsolidasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo, Kab/Kota serta Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dengan Pendamping KUKM dalam rangka mencari solusi permasalahan terhadap akses pembiayaan.
 4. Jumlah pelaku usaha yang mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dan Progran Ultra Mikro (UMI) berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan RI sebanyak 42.578 dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.276.353.434.079,- dan Outstanding sebesar Rp. 927.825.738.419,-.
 5. Akses Permodalan, Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses Permodalan di tahun 2022 adalah 4867 KUKM berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan



melalui kegiatan sosialisasi melalui iklan dan penyiaran di media (RRI dan Koran) dengan sumber dana APBD.

Adapun data perkembangan realisasi KUR tahun 2022 menurut Bank Indonesia.

Tabel 2.7. Realisasi KUR Per Sektor Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Sektor Ekonomi	Realisasi KUR					
		2020		2021		2022	
		Nilai (Rp .000)	Nilai (Rp .000)	Nilai (Rp .000)	Debitur	Nilai (Rp .000)	Debitur
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	247.838.580	436.478.452	436.478.452	18.285	527.855.247	18274
2	Perikanan	31.199.850	57.717.150	57.717.150	2.711	62.819.456	2170
3	Industri Pengolahan	79.611.876	117.211.950	117.211.950	4.112	97.900.680	2546
4	Konstruksi	107.000	755.000	755.000	9	2.305.000	10
5	Perdagangan Besar dan Ecer	252.145.592	577.785.868	577.785.868	20.094	658.788.566	21.951
6	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	32.369.679	52.643.000	52.643.000	1.604	45.316.400	949
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	19.271.900	25.779.000	25.779.000	1.284	20.308.464	955
8	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa	2.466.500	5.506.000	5.506.000	205	6.697.000	165
9	Jasa Pendidikan	420.000	70.000	70.000	2		
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.712.000	3.467.000	3.467.000	71	2.680.000	37
11	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dll	57.380.400	96.947.000	96.947.000	3.870	104.131.428	3190
TOTAL		726.523.377	31.567	1.374.360.420	52.247	1.528.802.241	50.247

Sumber : Data SIKP, Kementerian Keuangan

Jumlah UKM Yang Dibina/Naik Kelas, pada tahun 2022 target UKM yang dibina sebanyak 50 UKM dan realisasinya mencapai 75 UKM (150 persen). pencapaian ini dilakukan antara lain dengan memaksimalkan kinerja konsultan PLUT melalui pendampingan UMKM naik kelas melalui kegiatan kelas bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan yang offline maupun dilaksanakan secara online. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan ditahun 2022 untuk mendukung ketercapaian target ini antara lain :



- a. Kegiatan Bimtek OSS (online Submission System) yang diikuti oleh 25 UKM di Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Terlaksananya Coaching Clinic di Kota Gorontalo sebanyak 4 kali yaitu:
 - Memulai Bisnis dengan benar Peserta 15 UMKM tanggal 31 Agustus Lokasi Mes Haji Provinsi Gorontalo
 - Produk dan Marketing Peserta 13 UMKM tanggal 9 September Lokasi YUMME O Mart
 - Intelegency Financial Peserta 6 UMKM tanggal 19 Oktober lokasi Hotel Grand Q Kota Gorontalo
 - Operation excellent Peserta 8 UMKM tanggal 20 Oktober lokasi Hotel Grand Q Kota Gorontalo
- c. Fasilitasi Legalisasi Asosiasi UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang diserahkan kepada 6 (enam) asosiasi UMKM se Provinsi Gorontalo yaitu :
 - Asosiasi Cemerlang, di Kabupaten Bone Bolango
 - Asosiasi Asyik-Go di Kabupaten Gorontalo
 - Asosiasi Smart City di Kota Gorontalo
 - Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Boalemo
 - Asosiasi UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara
 - Asosiasi Geraha EK Kreatif di Kabupaten PohuwatoFasilitasi legalisasi asosiasi UMKM ini bertujuan untuk mendorong UMKM di setiap wilayah mempunyai wadah kelembagaan yang sudah terlegalisasi sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya
- d. Pemutakhiran data UMKM yaitu pembuatan pembuatan aplikasi sistem informasi data UMKM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo “SiapAku”. Yang berisi tentang data UMKM se-Provinsi Gorontalo yang up-date.

Kegiatan umkm naik kelas ini bertujuan untuk memperkuat peran daerah dalam memberdayakan UMKM di daerahnya sesuai dengan amanat PP 38/2007, meningkatkan keterjangkauan UMKM pada



layanan pengembangan usaha, meningkatkan jumlah dan perluasan usaha umkm, mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM.

Jumlah Produk UKM/IKM yang Dipromosikan/dipasarkan di Dalam dan Luar Daerah, pada tahun 2022 targetnya sebesar 20 produk UKM/IKM dengan tingkat capaian 175 persen. pencapaian ini dilakukan antara lain dengan memaksimalkan pada beberapa kegiatan antara lain :

- a. Terlaksananya Kegiatan Gebyar UMKM pada tanggal 25 s/d 28 Februari Grand Q dan City Mall Kota Gorontalo dengan jenis Kegiatan sebagai berikut :
 - Lomba Inovasi Prodak Bagi UMKM dengan jumlah peserta 35 UMKM
 - Lomba Foto Produk dengan jumlah peserta 21 UMKM
 - Lomba Video Produk dengan jumlah peserta 10 UMKM
 - Lomba membuat Hampers dengan jumlah peserta 6 UMKM
 - Serta Pameran Produk UMKM tingkat Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta 64 UMKM
 - Fasilitas Layanan UMKM (UMKM service) diantaranya :
 - Fasilitas Desain Kemasan Dari Dinas KUMPERINDAG Prov. Gorontalo
 - Fasilitas rumah Kemasan ke Bela Pengadaan UMKM Gorontalo
 - Fasilitas Pelayanan Perizinan melalui OSS dari DMPTSP Prov. Gorontalo
 - Fasilitas PIRT dan MD dan dari BPOM
 - Fasilitas HAKI dan Perseroan perorangan dari KEMENKUMHAM Provinsi Gorontalo
 - Fasilitas Halal dari BPJPH KEMENAG dan MUI serta LPPOM Provinsi Gorontalo



- b. Terlaksananya Kegiatan kelas Bisnis bagi pelaku UMKM di kecamatan Wonosari yang di laksanakan 4 kali dengan Jumlah peserta sebanyak 100 UMKM :
- Branding Produk bagi UMKM Aula Desa Trirukun 25 Peserta UMKM
 - HPP (Harga Pokok Produksi) Wiasat Religi Desa trirukun 25 Peserta UMKM
 - Laporan Keuangan Aula Desa Bongo III 25 Peserta UMKM
 - BMC (Bisnis Model Canvas) Aula Desa harapan 25 Peserta UMKM
- c. Terlaksananya kegiatan Mentoring Bisnis UMKM Berbasis Syariah bagi 10 PONTREN dan LKSA yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tema “Pentingnya Mindset Wirausaha bagi Pelaku UMKM di Pondok Pesantren dan LKSA” dan “ Membangun Branding Produk bagi Pelaku UMKM di Pondok Pesantren dan LKSA
- d. Terlaksananya Bantuan Bahan Produksi bagi UMKM pada tahun 2022 Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo di bagi menjadi tiga wilayah yaitu Kota dan Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara serta Pohuwato dan Boalemo dengan jumlah UMKM yang diberikan bantuan sejumlah 385 UKM dengan Total anggaran Rp. 770 .000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh juta rupiah)
- a. Bantuan Alat dan Bahan Produksi bagi PONTREN dan LKSA sejumlah 10 Pontren dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yaitu :
- LKS Ummu Syahidah. Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Sawit Kel. Buladu Kec. Kota Barat. Kota Gorontalo.
 - LKSA Harapan Umat. Jenis produksi industri pengolahan. Kel. Tamalate Kec. Kota Timur. Kota Gorontalo
 - LKSA Moosalamati . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Kancil Kel. Buliide Kec. Kota Barat. Kota Gorontalo
 - Sanggar Tuna Runggu . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Yusuf Hasiru Kec. Sipatana. Kota Gorontalo



- Pondok Pesantren Khairul Hikmah. Jenis produksi industri pengolahan. Desa Longalo Kec. Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango
 - LKSA Al-Inayah . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Mukhlis Rahim Desa Timbuolo Timur Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango
 - LKSA Aisyiah. Jenis produksi industri pengolahan. Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo
 - LKSA Amal Sholeh . Jenis produksi industri pengolahan. Desa tilote Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo
 - LKSA Ar- Rahman . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Arifin Badu Desa Iluta Kec. Batudaa. Kabupaten Gorontalo
 - Pondok Pesantren Darul Madinah, Jenis produksi industri pengolahan. Desa Jatimulya Kec. Wonosari Kabupaten Boalemo.
- b. Terlaksananaya 1 (satu) Factory Sharing di Kecamatan Wonosari Desa Trirukun dengan Pagu anggaran Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- c. Terlaksananya Bantuan 10 buah Both bagi pelaku UMKM di lingkungan kantor Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo
- d. Terlaksanakannya kegiatan Side Event Pameran Presidensial G20 di Bali
- e. Terfasilitasinya pembentukan Asosiasi UMKM kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo

Adapun perkembangan Jumlah UKM tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.8 Rekap Data UMKM Tahun 2018 – 2022
Per Kabupaten/Kota di Provinsi
Gorontalo**

WILAYAH	2018			2019			2020			2021			2022		
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH
KAB. GORONTALO	33.158	382	8	422	13	13	43.124	422	13	43.124	422	13	29.596	419	12
KOTA GORONTALO	8.598	2.642	400	2.692	400	400	11.415	2.692	400	11.415	2.692	400	11.415	2.692	400
KAB. GORONTALO UTARA	3.447	213	13	213	15	15	5.475	213	15	5.475	213	15	5.475	213	15
KAB. POHUWATO	6.390	240	107	240	104	104	10.684	240	104	10.684	240	104	10.914	85	19
KAB. BOALEMO	5.718	142	85	1.499	202	99	10.227	1.499	202	10.227	1.499	202	10.913	1.493	202
KAB. BONE BOLANGO	2.776	11	5	205	37	5	7.862	205	37	7.862	205	37	7.699	174	26
JUMLAH	60.087	3.630	618	5.271	771	636	88.787	5.271	771	88.787	5.271	771	75.292	5.076	674

Sumber : Bidang UKM Diskumperindag Provinsi Gorontalo

Perkembangan UMKM selang tahun 2021-2022 mengalami penurunan 15 persen. Hal ini dikarenakan ditahun 2022 telah diupayakan pemutakhiran data UMKM sehingga data dobel ataupun yang sudah tidak aktif akan mempengaruhi berkurangnya jumlah UMKM. Perkembangan UMKM dari skala mikro ke skala kecil dan menengah diharapkan akan terlihat pertumbuhannya di tahun mendatang.

Untuk tahun 2022 ditargetkan jumlah UMKM yang dibina akan terus bertambah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program pengembangan UKM, antara lain melalui:

1. Pembinaan UMKM Naik Kelas (UMKM berbasis syariah)
2. Kelas Bisnis UMKM untuk pengembangan desa wirausaha
3. Stimulan Bagi UMKM
4. Factory sharing bagi UKM
5. Bimtek OSS (online single submission) dan rakor asosiasi UMKM



6. Sinergitas Program dan Kegiatan antara APBN dan APBD lebih di tingkatkan sehingga semakin menunjang pembangunan di sektor Koperasi dan UKM
7. Peningkatan Peran pendamping KUKM dalam upaya meningkatkan produktifitas dan kemampuan para pelaku usaha.

Meningkatnya **Jumlah IKM Yang Dibina**, adapun persentase capaian indikator program pengembangan industri kecil menengah tahun 2021 sebesar 424% sebanyak 212 IKM. Adapun capaian RPJMD sebanyak 15.767 IKM dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 15.339 IKM. Adapun jumlah 15767 IKM adalah merupakan akumulasi dari jumlah IKM sejak tahun 2017.

Kebijakan pembangunan perindustrian difokuskan pada peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Tabel 2.9. Perkembangan IKM Tahun 2017 – 2021

No	URAIAN	JUMLAH			
		2018	2019	2020	2021
1	INDUSTRI KECIL MENENGAH	12.985	14.282	15.221	15.211
2	SENTRA IKM	-	-	-	39
3	JUMLAH TENAGA KERJA	31.283	34.971	35.727	25.855
4	NILAI INVESTASI (Rp.)	187.103.014	5.197.067.090	5.193.825.361	242.379.449
5	NILAI PRODUKSI (Rp.)	672.012.186	767.899.395	976.894.427	946.172.392

Sumber : Bidang Industri, Diskuperindag Prov. Gorontalo

Tabel diatas menunjukkan perkembangan IKM yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selang tahun 2018 - 2021 pertumbuhan IKM naik sebesar 17,14%. Demikian halnya dengan



jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi menunjukkan peningkatan selang tahun 2018 hingga 2021.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran penumbuhan industri kecil menengah adalah :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi. *Output kegiatan* ini adalah. :

- a. Kegiatan Pelatihan Perencanaan Pemasaran Produk IKM yang diikuti oleh 20 IKM Pangan, Kerajinan dan perbengkelan dengan anggaran
- b. Pembuatan Alat pakan
- c. Pemeliharaan Gedung KIAT
- d. Revitalisasi Peralatan KIAT (mesin pakan)
- e. Bahan Baku untuk kemasan senilai Rp. 29.790.203,- yang dipersiapkan untuk UPTD kemasan Berupa aluminium foil 10 roll, kertas sticker 450 lembar, toner color laserjet, palstik standing pouch 3000 lembar dengan 3 ukuran

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri

- a. Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di laksanakan di Kabupaten Pohuwato yang diikuti oleh 20 IKM pada bulan Mei Tahun 2022
- b. Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di laksanakan di Provinsi Gorontalo yang diikuti oleh 20 IKM dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.
- c. Pelatihan Pengembangan WUB IKM Pangan di Provinsi Gorontalo bulan Februari 2022 diikuti oleh 20 Peserta.
- d. Fasilitasi Kemasan untuk 20 IKM Pangan dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2022. Fasilitasi ini diberikan untuk meningkatkan daya saing produk IKM Pangan.



- e. Fasilitasi Halal untuk 20 IKM Pangan dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2022.
- f. Fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik dan penerbitan izin usaha untuk 4 (empat) IKM Pangan yang dilaksanakan pada bulan Maret dan April Tahun 2022 yaitu :
 - IKM Irna Cookies & Bakery Kab.Pohuwato
 - IKM Mafahim Kab.Gorontalo
 - IKM Moringa Kab.Gorontalo
 - IKM Usaha Barokah Kab.Gorontalo Utara
- g. Bantuan Pengembangan WUB yaitu fasilitasi pembangunan rumah produksi, bahan dan peralatan, pemasangan listrik dan penerbitan izin usaha (akta notaris) untuk 1 (satu) IKM yaitu IKM Pongkep Jaya (Desa Otiola Ponelo Kepulauan Kab.Gorontalo Utara) dengan anggaran sebesar Rp 47.500.000,-
- h. Fasilitasi Peralatan Meubel dan Furniture bagi 4 (Empat) IKM Meubel dengan anggaran total Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yaitu :
 - a. Meubel Rivrey (Kab.Gorontalo)
 - b. Meubel Kayu Nantu (Kab.Gorontalo)
 - c. Meubel Kharisma (Kab.Bone Bolango)
 - d. Meubel Ainan (Kota Gorontalo)
- i. Bantuan Pengembangan WUB yaitu fasilitasi pembangunan rumah produksi, bahan dan peralatan, fasilitasi pemasangan listrik dengan anggaran sebesar Rp 133.500.000,- untuk 3 (tiga) IKM Pangan yaitu :
 - IKM 3 Putra Cake & Cookies (Kab.Gorontalo)
 - IKM Ilham Cookies (Kab.Gorontalo)
 - IKM Mohoingo /Gula Semut (Kab.Gorontalo Utara)*(sumber dana DID Periode 1)*
- i. Sosialisasi Wira Usaha Baru di Provinsi Gorontalo sebesar *(sumber dana DID Periode 1)*



c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

1. Pelatihan pengembangan Wirausaha Baru
2. Workshop E- Smart bagi IKM
3. Pelatihan Desain dan Padu padan Warna Sulaman Karawo
4. Stimulasi sarana dan prasarana untuk penumbuhan dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah

a. Stimulan yang diberikan melalui APBD tahun 2022 kepada 3 IKM yaitu :

- IKM Sumber Usaha Karawo (Kab. Gorontalo)
- IKM Dkorsase (Kota Gorontalo)
- IKM Belgina (Kab. Bone Bolango)

Adapun jenis stimulan masing-masing IKM sebesar Rp. 47.500.000 berupa :

- Pembuatan/renovasi bangunan usaha ;
- Peralatan dan bahan/ material penunjang usaha;
- Pemasangan Listrik; dan
- Pembentukan Badan Usaha

b. Stimulan melalui APBDP tahun 2022 berupa Mesin Jahit kepada 8 IKM dengan anggaran sebanyak Rp. 62.000.000.- yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Tiar Craft	Kel. Limba U II Kecamatan Kec. Selatan Kota Gorontalo
2	Lala Craft	Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo
3	Hasni Mosii	Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
4	Irmayanti	Kecamatan Limboto. Kab. Gorontalo
5	Vidyatum Mboka	Kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya
6	Wirda Amin	Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo
7	Farida Mohamad	Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo
8	Nifralinsa Lamhairi	Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo



c. Stimulan melalui sumber dana Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 diberikan kepada 3 IKM Kerajinan masing masing sebesar Rp. 44.500.000.- yaitu :

- Hartati Bakri (Itatzs Mode) Kab. Gorontalo
- Alifah A. Sh Jusuf (Farabi Collection) Kab. Bone Bolango
- Gilbert (Gkarawo) Kab. Gorontalo

Bantuan yang diberikan berupa :

- Untuk pembuatan/renovasi bangunan usaha ;
- Peralatan dan bahan/ material penunjang usaha;
- Pemasangan Listrik

5. Rakernas dan Pameran Dekranas di Jakarta

d. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

a. Bantuan untuk kelompok IKM ILMEA

- Bantuan Bahan dan peralatan IKM senilai Rp. 22.500.000,- (Abd. latif Yunus, Desa Boliohuto. Kabupaten Gorontalo
- Bantuan Bahan & peralatan IKM, Fasilitas pemasangan listrik, penerbitan izin tempat usaha, peralatan dan fasilitas tempat usaha senilai Rp. 45.000.000,- (Sofyan Bahua. Kecamatan Limboto. Kabupaten Gorontalo)
- Fasilitas bahan & peralatan IKM, pemasangan listrik & Fasilitas tempat usaha senilai Rp. 44.500.000 (M. Rafik. Zayn Motor Desa Dutulanaa. Kec. Limboto. Kabupaten Gorontalo

b. Bantuan Peralatan perbengkelan bagi 3 (tiga) IKM ILMEA yaitu :

- Seprin Ahmad Desa Talango. Kabupaten Gorontalo Utara
- Rizki Mooduto, Kabupaten Bone Bolango
- Bengkel Al-Mutazam Desa Buntulia. Kabupaten Pohuwato

c. Pelatihan Pembuatan Oven Pengering Olahan Pangan dengan jumlah peserta 20 IKM perbengkelan selama 3 hari

d. Bantuan bagi kelompok peternakan/pembibitan ayam *sumber dana DID Periode I* yaitu bantuan bahan & peralatan IKM, Fasilitas



Tempat Usaha dan Pakan ternak Ayam di Kabupaten Bone Bolango .

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional :
 - a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - b. Sosialisasi Aplikasi sistem informasi yang dilaksanakan di Kota Gorontalo. Peserta adalah Aparat pembina dari dinas Perindustrian dan operator Kabupaten/Kota.
 - c. Penganggaran untuk honorarium 2 (dua) orang pengumpul dan pengolah data IKM di kab/kota yang dibayarkan setiap triwulan. Dimana tugas dari pengumpul data ini yaitu mengumpulkan
 - d. Terlaksananya Pembuatan Aplikasi sistem informasi berbasis web Sistem Informasi Digital Industri Gorontalo (SIIDIG)
 - e. Aplikasi Directory Data IKM Provinsi Gorontalo (jumlah IKM, Nilai investasi, nilai produksi, jumlah tenaga kerja, klasifikasi per cabang industri)

Kebijakan pembangunan bidang industri difokuskan pada peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah, dengan sasaran utamanya adalah peningkatan pertumbuhan IKM. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Untuk itu penting untuk mendorong pembangunan sektor industri yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

Jumlah Perdagangan Antar Pulau, adapun capaian indikator program tahun 2021 sebesar 120,03%, yang dihasilkan dari pencapaian jumlah perdagangan antar pulau di tahun 2022 sebanyak 4033 kali dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 3600 kali. Jumlah



perdagangan antar pulau ini diperoleh dari data SIPAP (system informasi perdagangan antar pulau) serta dukungan kegiatan dengan anggaran dekonsentrasi.

Beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2022 ditargetkan sebanyak 150x di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo, dengan capaian 33 kali dan berhasil melayani masyarakat sebanyak 65.000 kpm. Dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi, ditargetkan dapat melayani 1000 kpm hingga 2500 penerima.

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat didaerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan pada menjelang hari besar keagamaan (HBKN), saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan bencana. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi antara lain beras, minyak goreng dalam kemasan, gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

Outcome : memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan atau masyarakat miskin yang ada di Provinsi Gorontalo.

Realisasi capaian pelaksanaan operasi pasar 33 kali lebih rendah dari target renstra sebanyak 150 kali disebabkan karena anggaran yang tersedia di tahun 2022 hanya dapat untuk merealisasikan 33 kali pelaksanaan di Provinsi Gorontalo. Adapun jumlah anggaran untuk pelaksanaan operasi pasar di tahun 2022 sebesar Rp. 8.212.500.000,- yaitu melalui sumber dana APBD sejumlah Rp. 1.297.500.000,-. Kemudian tambahan melalui sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 4.421.250.000,- dan periode 2 Rp. 2.493.750.000,- Total Realisasi



Rp. 7.691.714.673,- Jika di estimasi untuk 1 kali pelaksanaan dengan total subsidi (8 komoditi) sekitar Rp. 230.000.000,- maka jumlah pelaksanaan 33 kali tersebut hanya dapat dicukupi dengan jumlah anggaran tersebut

- b. Pemantauan Harga Barang Pokok di Pasar Rakyat di Kabupaten/Kota sebanyak 6x, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi ketersediaan stok barang pokok, sekaligus mengumpulkan informasi harga barang pokok yang berlaku saat itu di pasar rakyat, apakah terjadi kenaikan harga ataukah terjadi penurunan harga, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, ataupun dasar pelaksanaan Operasi Pasar/ Kebutuhan Pokok Bersubsidi.
- c. Honorarium pengolah data dan operator Sistem Perdagangan Antar Pulau untuk menginput data bongkar muat antar muat/antar Provinsi yang sumber data dari pelabuhan bongkar muat di Provinsi Gorontalo.
- d. pelaksanaan pengawasan dikhususkan untuk pupuk bersubsidi, mulai dari alokasi kuota pupuk bersubsidi di tiap Kabupaten/Kota, proses pendistribusiannya, penerapan harga eceran tertinggi, hingga kesesuaian penerima alokasi pupuk bersubsidi. Secara umum hasil kegiatan pengawasan berjalan dengan lancar, namun belum begitu efektif karna terbatas dengan ketersediaan anggaran. Permasalahan mulai adanya keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi, masih adanya petani yang ingin membeli pupuk subsidi, namun belum terdaftar dalam sistem E-RDKK, hingga adanya indikasi penjualan pupuk subsidi yang tidak sesuai (baik kuota, lokasi, hingga penerima pupuk), semuanya bisa diawasi dan dikoordinasikan dengan pihak produsen maupun distributor untuk penyelesaian permasalahannya, dan jika ada pelanggaran cukup ditindak-lanjuti dengan sanksi administrasi

Jumlah Export, dengan tingkat capaian indikator program ini adalah sebanyak 12 komoditi dengan target 11 komoditi. (91,66%) adapun Jumlah komoditi ekspor untuk tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) komoditi produk ekspor yaitu ikan tuna, molases, kelapa parut, santan, biji



kakao, ijuk, siaw nutmeg (biji pala), jagungwood pelet, briket dan gula aren, dengan jumlah komoditi 156.815 Ton dan nilai eksport \$ 44.893.492,67

Jumlah komoditi produk eksport yang dipromosikan sebanyak 14 komoditi dari target 10 komoditi . kegiatan yang mendukung yaitu pelaksanaan misi dagang dan pameran. Adapun jumlah Komoditi Produk Eksport yang dipromosikan sebanyak 14 komoditi yaitu kue kering, cengkeh, kelapa, kemiri, jagung, mente, kayu manis, pala, madu, teh celup daun kelor, sarabba daun kelor, serbuk daun kelor, karawo dan keripik ubi.

Misi dagang eksport dan antar pulau target 1 misi dagang pada renstra. adapun aktivitas kegiatan yang mendukung pencapaian target ini antara lain kegiatan misi dagang di Provinsi Sulawesi Selatan diikuti oleh 6 (enam) Pelaku Usaha Dari Gorontalo yaitu Rahida Cookies Gorontalo (Aneka Kue kering, Komunitas Bisa Ekspor Gorontalo (komoditi cengkeh, kelapa, kemiri, jagung, mente, kayu manis dan pala), IKM Madu Suwawa (Produk Madu), IKM Moringa Gorontalo (Teh celup daun kelor, sarabba kelor, serbuk daun kelor), IKM Azzarah (Bahan Karawo, Dasi Karawo, Kopiah Karanji), IKM Aren GO (Gula Aren) dan pameran dagang Keikutsertaan pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke 37 yang merupakan agenda promosi di sektor perdagangan, pariwisata dan investasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan pameran diikuti 2 (dua) IKM yaitu IKM Belgina Collection (produk kerajinan karawo) dan UKM Say Factory (produk Pangan) serta kegiatan pembinaan IKM yang memahami prosedur eksport tahun 2022.

Jumlah UKM yang memahami prosedur export target renstra 20 calon ekportir, capaian tidak ada. Ketidackapaian terhadap target jumlah ukm yang memahami prosedur export sebanyak 20 calon exportir disebabkan karena anggaran APBD 2022 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini tidak dianggarkan di tahun 2022 karena ada penganggarannya di kegiatan APBN akan tetapi dibulan Maret kegiatan dari sumber dana APBN ini mengalami refocusing sehingga target tidak tercapai.



Jumlah Sertifikasi Mutu Barang, adapun persentase capaian indikator program tahun 2022 adalah 12 sertifikat dari target 3 sertifikat.

Program ini didukung oleh kegiatan :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian

Indikator kinerja ***Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang***, target 1200 kali, capaian 1051 kali (87,58%). Target 1200 kali pengujian standar mutu barang belum dapat dicapai di Tahun 2022 dimana realisasi capaian sebanyak 1051 kali (87,58%) hal ini disebabkan terdapat beberapa permohonan pengujian yang tidak dapat dilayani karena peralatan uji (instrumen analisis) yang belum tersedia. Pemanfaatan gedung laboratorium baru yang masih terkendala dengan penyediaan instalasi listrik untuk peralatan pengujian (instrumen analisis kromatografi gas) untuk pengujian minyak goreng dan senyawa hidrokarbon produk pangan, menyebabkan alat analisis ini belum dapat dioperasikan/difungsikan. Disamping itu rusaknya/tidak berfungsinya alat penyimpan daya (UPS) Kromatografi Gas ini ikut mempengaruhi jumlah permintaan pengujian yang terlayani

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pengambilan sampel komoditi di kabupaten/kota
- b. Pemeliharaan alat laboratorium yaitu penggantian baterai UPS 12.000 volt
- c. Kalibrasi peralatan uji laboratorium oleh lembaga kalibrasi terakreditasi.
- d. Pengujian khusus untuk komoditi akreditasi sebagai komoditi ekspor yaitu jagung sejumlah 83.250 ton dengan 12 SKM yang diterbitkan
- e. Fasilitasi kandungan gizi untuk UKM pangan berkemasan standar untuk tahun 2022 adalah sejumlah 53 UKM di kab/kota se Provinsi Gorontalo



- f. Uji profisiensi lada putih diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan RI.
- g. Magang pengujian proksimat di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Manado, Sulawesi Utara
- h. Penyediaan bahan kimia serta bahan penunjang pengujian laboratorium
- i. Mengikuti kegiatan Uji Banding antar Laboratorium, yaitu :
 - Uji banding beras yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Bandar Lampung pada tanggal 20 sd 23 juni 2022, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi beras.
 - Uji banding jagung yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi mutu barang gorontalo pada tanggal 26 sd 30 september 2022, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi jagung. Diantara 4 (empat) laboratorium, UPTD BPSMB Disperindag Provinsi sulsel, UPTD BPSMB Provinsi sulteng, UPT PSMB jember dan UPTD BPSMB Disperindag Lampung memperoleh hasil satisfactory (sangat memuaskan).
 - ~ Uji banding rumput laut yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi mutu barang samarinda pada tanggal 5 sd 9 Desember 2022,
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi, dengan indikator kinerja ***Jumlah Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang***, target 30 pelaku usaha dengan capaian sebanyak 51 pelaku usaha.
Aktifitas yang mendukung pencapaian target ini meliputi:
 - a. Pengawasan mutu barang/komoditi ber-SNI di kabupaten/kota



- b. Sosialisasi penerapan standardisasi mutu komoditi beras di kabupaten/kota
- c. Sosialisasi tugas dan fungsi BPSMB melalui media cetak (Harian Gorontalo Post) dan media elektronik (TVRI)
- d. Penerapan sistem manajemen mutu
- e. Surveilans (audit eksternal) Sistem Manajemen Mutu oleh KAN
- f. Studi banding komparasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dan BPSMB Manado, Sulawesi Utara
- g. Jejaring kerja dengan Dinas Perindag kabupaten/kota

Sejak tahun 2020 pelaksanaan program peningkatan standarisasi mutu barang lebih diarahkan pada optimalisasi peran BPSMB dalam memfasilitasi pengujian dan sertifikasi mutu barang/produk unggulan Gorontalo, dan tidak hanya terbatas pada komoditi Jagung dan Rumput Laut, dan juga telah dilakukan penambahan 2 lingkup sertifikasi yakni biji Kakao dan Kopi serta penambahan pelayanan pengujian.

B. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Indikator kinerja adalah Jumlah Pelaku Usaha Yang Diawasi.

Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen, target 120 pelaku usaha dengan capaian 120 pelaku usaha. yang diindikasikan dengan penanganan kasus pengaduan konsumen dan pengawasan secara berkala pada pelaku-pelaku usaha di Provinsi Gorontalo. Pengawasan barang beredar dan jasa serta pengawasan perdagangan di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana APBD dilakukan terhadap pelaku usaha, pedagang, pengecer,



distributor serta gudang-gudang. Aktivitas yang mendukung pencapaian target ini yaitu :

Pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo. yaitu antara lain :

1. Untuk Barang :

- a. Standar
- b. Label dalam bahasa Indonesia
- c. Petunjuk Penggunaan
- d. Jaminan Layanan Purna Jual
- e. Cara Menjual
- f. Pengiklanan
- g. Kalusula Baku

2. Untuk Jasa :

- a. Standar
- b. Jaminan dan/atau garansi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
- c. Kalusula Baku

3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;

- a. Perizinan di bidang perdagangan
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, di larang dan/atau diatur
- c. Distribusi
- d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
- e. Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
- f. Pendaftaran Gudang
- g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
- h. Perdagangan melalui sistem elektronik



Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :

1. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin, Yang belum sesuai dengan Standar Nasional
2. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang di Kabupaten Gorontalo, toko di di Kabupaten Boalemo serta Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara

Pengawasan Perdagangan antara lain :

1. Distribusi
 - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
 - Pola Distribusi dari Produsen
 - Distributor, Agen ke Pengecer.
 - Distribusi Barang
 - b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.
 - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.
 - c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.
2. Perijinan
 - Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)
3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - Pasar rakyat
 - Pusat-pusat perbelanjaan
 - Toko swalayan
 - Gudang
 - Sarana perdagangan lainnya

Hasil Pengawasan

1. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang



2. Untuk kota gorontalo tidak lagi mengeluarkan Tanda daftar gudang sebab daerah kota gorontalo tidak memenuhi syarat lingkungan untuk didirikan gudang.
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian)
6. Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET,
7. Terdapatnya Toko-Toko yang menjual HP yang tidak Mempunyai Garansi
8. Masih terdapatnya distributor besi yang menjual Besi Beton yang sudah mempunyai SNI namun ukuran panjang diameternya tidak sesuai dengan ukuran yang di janjikan.

C. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen. Dengan Indikator Kinerja Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen.

Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Capaian di tahun 2022 sebesar 91 kasus dari target 80 kasus

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK yang dilaksanakan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato



- b. Pembentukan Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen di 3(tiga) Kabupaten/Kota, yakni BPSK Kabupaten Boalemo, BPSK Kabupaten Gorontalo Utara, BPSK Kabupaten Bone Bolango, dimana pelantikan dan pengambilan sumpah pada Bulan September Tahun 2022. BPSK ini beranggotakan 9 (Sembilan) Orang anggota dan Sekretariat BPSK beranggotakan 3 (tiga) orang anggota
- b. Sosialisasi BPSK di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPSK juga di laksanakan oleh anggota BPSK di setiap pelaksanaan pasar murah di kabupaten kota sesuai dengan lokasi pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.
- c. Jumlah Pengaduan Konsumen Provinsi Gorontalo sebanyak 91 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 91 kasus antara lain tentang Pengaduan permasalahan pembiayaan, Pengaduan mengenai pengkreditan melalui Bank, Pengaduan Klausula Baku
- d. Penyelesaian sengketa Konsumen :
 - BPSK Kabupaten Pohuwato ditahun 2022 menerima 17 kasus dan diselesaikan secara mediasi
 - BPSK Kota Gorontalo, 12 kasus dan penyelesaian sengketa secara mediasi 12 kasus
 - ~ BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2022, menerima 17 kasus, yang diselesaikan melalui meidasi 4 kasus, arbitrase 7 kasus, masih dalam proses 2 kasus, pembatalan permohonan 4 kasus
 - ~ BPSK Kabupaten Boalemo, menerima 12 kasus ditahun 2022. Masih dalam proses 3 kasus, mediasi 1 kasus, arbitrase 2 kasus dan 2 kasus dibatalkan oleh pemohon, menunggu putusan 4 kasus
 - ~ BPSK Kabupaten Bone Bolango yang dilantik di bulan September 2022 belum menerima kasus pengaduaan di tahun 2022
 - ~ BPSK Kabupaten Gorontalo Utara, 2 kasus telah diselesaikan dan 1 kasus dalam proses.



Persentase Peningkatan Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan Sarana Prasarana dan SDM Aparatur, dengan realisasi tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100%, sesuai dengan yang ditargetkan. Ketercapaian indikator program ini didukung oleh ketercapaian target terhadap indikator :

Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag, dengan realisasi tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100%, yang diindikasikan dengan tercapainya target persentase pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sebesar 100%.

Jumlah SDM Aparatur Yang Dilatih dengan realisasi tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 130%, yang diindikasikan dengan tercapainya target jumlah SDM aparatur yang dilatih dalam menunjang penyelenggaraan kewenangan dan tupoksi SKPD

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD, dengan tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 86,27%.

Ketidakcapaian fisik ini dikarenakan ada item belanja yang tidak terealisasi yaitu:

- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (jasa KIR) sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi pada Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (pajak STNK) sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Belanja modal kendaraan bermotor penumpang (kendaraan operasional dinas), senilai Rp. 700.00.000,-

Ketidakcapaian fisik ini dikarenakan untuk harga mobil plat merah masih menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk dirilis harganya sehingga belum dapat dicantumkan harganya pada E-katalog sehingga untuk proses pengadaannya tidak dapat dilaksanakan hingga 31 Desember tahun 2022.

Belanja modal kendaraan bermotor penumpang ini teranggarkan melalui sumber dana DID Keuangan Tahun Berjalan Periode ke 2, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor



170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022)

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan antara lain :

- a. Belum tersedianya sistem manajemen portofolio SDM aparatur SKPD, menyebabkan pemetaan dan distribusi SDM lingkup SKPD serta pemenuhan prosedur kenaikan pangkat dan gaji berkala belum optimal.
- b. Dukungan kendaraan operasional khususnya Roda Empat baik untuk mendukung pelaksanaan tugas
- c. Fasilitas gedung yang tidak representatif sehingga perlu untuk dilakukan renovasi kembali

Pada tahun 2022 program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara cepat, efisien dan terukur, sehingga bisa menciptakan kepastian waktu dan kejelasan prosedur pelayanan dalam rangka pelayanan publik. Sedangkan untuk program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD.

Persentase pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi monitoring dan pelaporan, dengan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% yang diindikasikan dengan tercapainya target persentase pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi monitoring dan pelaporan sebesar 100%.

Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh ketercapaian indikator kegiatan yaitu antara lain:

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan, dengan realisasi tingkat capaian kinerja sebesar 50% yang diindikasikan dengan tercapainya target jumlah dokumen pelaporan keuangan sebanyak 1 dokumen laporan keuangan.

Penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2021 tidak lepas dari program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran yang



berbasis kinerja, yang pada prinsipnya tetap difokuskan pada pencapaian indikator kinerja utama sasaran pembangunan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan perencanaan jangka menengah RPJMD 2017 – 2022, sehingga penyesuaian-penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, termasuk di sektor KUMKM, perindustrian dan perdagangan.

Sebagai bagian dari dinamika pembangunan daerah, maka perkembangan tuntutan dan kebutuhan daerah tersebut perlu direspon secara cepat, tepat dan terukur, agar dampak yang ditimbulkannya bisa memberikan *multiplier effect* terhadap hajat hidup orang banyak dan perekonomian daerah.

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor/SKPD/Pusat dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% yang diindikasikan dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 8 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan, melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat, antar SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD, dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% yang diindikasikan dengan ketersediaan jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD sebanyak 7 dokumen berupa Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2021, serta dokumen evaluasi berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan Laporan Monev Program, dengan persentase kenaikan sebesar 100%.

Namun demikian, masih ditemui beberapa permasalahan yang perlu dibahas dan solusi terbaik, antara lain :

- a. Sesuai tupoksi Dinas Kumperindag menjalankan 3 kewenangan yakni Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Ditingkat pusat,



ketiga kewenangan ini dilaksanakan oleh 3 Kementerian. Dengan perbandingan ini terlihat beban dan volume pekerjaan yang melekat pada Dinas Kumperindag sangat besar dan memerlukan sumberdaya yang besar pula untuk melaksanakannya. Beberapa dukungan sumberdaya yang diperlukan dalam rangka penguatan peran SKPD antara lain SDM, sarana prasarana kantor, ketersediaan kendaraan dinas operasional, dukungan pendanaan APBD dan APBN.

Untuk itu, pada tahun 2022 program peningkatan kualitas perencanaan bidang Kumperindag diarahkan untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan relevansi program dan kegiatan baik melalui forum perencanaan, Forum SKPD Tingkat Kabupaten/Kota, koordinasi ke pusat, antar provinsi dan lintas kabupaten/kota, lintas instansi, dan lintas pemangku kepentingan, sehingga kinerja hasil program dan output kegiatan bidang Kumperindag akan bisa mendorong pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017 – 2022.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Dinas Kumperindag antara lain :

- Jumlah revitalisasi koperasi di tahun 2022 belum tercapai disebabkan tidak adanya usulan dari kabupaten/kota untuk koperasi yang akan di revitalisasi. Beberapa koperasi tidak ada kesiapan dari koperasi untuk dibedah karena faktor internal. Sehingga untuk koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif ini hanya dilakukan pola pembinaan kepada para pengurusnya.
- Keterbatasan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan terutama melalui tambahan anggaran sumber dana DID yang diperoleh di akhir triwulan IV seperti untuk belanja modal kendaraan bermotor roda empat. Ketidakcapaian ini dikarenakan untuk harga mobil plat merah masih menunggu persetujuan dari



Kemendagri untuk dirilis harganya sehingga belum dapat dicantumkan harganya pada E-katalog sehingga untuk proses pengadaannya tidak dapat dilaksanakan hingga 31 Desember tahun 2022.

- Masih adanya kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang tidak dapat dianggarkan karena bertentangan dengan aturan yang berlaku dan bukan kewenangan dinas Kumperindag.
- Untuk target 1 (satu) industri agro belum ada realisasinya di tahun 2022 karena Rencana untuk membentuk 1 (satu) UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan masih menunggu Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
- Minimnya peralatan laboratorium pengujian mutu terutama instrumen analisis menyebabkan pelayanan kepada konsumen/pelanggan tidak maksimal. Banyaknya permintaan pengujian dari pelanggan yang tidak dapat dilayani karena keterbatasan instrumen analisis, seperti AAS (*Atomic Absorption Spectrophotometer*) dan HPLC (*High Performance Liquid Chromatography*).

Pemanfaatan gedung laboratorium baru yang masih terkendala dengan penyediaan instalasi listrik untuk peralatan pengujian (instrumen analisis kromatografi gas) untuk pengujian minyak goreng dan senyawa hidrokarbon produk pangan, menyebabkan alat analisis ini belum dapat dioperasikan/difungsikan. Disamping itu rusaknya/tidak berfungsinya alat penyimpan daya (UPS) Kromatografi Gas ini ikut mempengaruhi jumlah permintaan pengujian yang terlayani

- Keterbatasan anggaran untuk pencapaian pelaksanaan operasi pasar
- Ketidakcapaian terhadap target jumlah ukm yang memahami prosedur export sebanyak 20 calon exportir disebabkan karena anggaran APBD 2022 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini tidak dianggarkan di tahun 2022 karena ada penganggarannya di kegiatan APBN akan tetapi dibulan Maret kegiatan dari sumber



dana APBN ini mengalami refocusing sehingga target tidak tercapai

Faktor-Faktor Penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain :

- a. Adanya dukungan anggaran yang mencukupi baik dari sumber APBD maupun yang bersumber dari dana dekonsentrasi sehingga dapat membantu pencapaian target kegiatan tahun anggaran 2022
- b. Dari segi permodalan usaha dari Perbankan; Makin banyaknya KUMKM yang memiliki usaha yang bankable (layak dari sisi usaha untuk didanai bank) sehingga kepercayaan bank terhadap KUMKM juga meningkat serta terjalinnya koordinasi yang baik antara Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dengan BI dan Bank Pelaksana di daerah dalam rangka penyaluran dan monitoring evaluasi KUR
- b. Membaiknya kinerja Tim Fasilitasi KUR yang dibentuk oleh Pemprov Gorontalo dalam rangka sosialisasi, pendampingan/fasilitasi serta penyelesaian masalah KUMKM dalam mengakses KUR
- c. Tingkat koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota terjalin dengan baik, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
- d. Meningkatnya jumlah koperasi yang menerapkan sistem akuntansi serta komputerisasi dan internet (IT).
- e. Semangat dan Upaya untuk mengembangkan produk kerajinan, logam dan produk pangan melalui peningkatan hasil pemasaran produk dan dukungan anggaran yang memadai untuk penyediaan bahan baku yang berkualitas dan upaya peningkatan kualitas SDM IKM melalui pelatihan/bimtek dan bantuan bahan dan peralatan.
- f. Dukungan pemerintah daerah untuk tetap mendorong semua pihak dalam meningkatkan ekspor Gorontalo hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian kerja sama MOU peningkatan ekspor



antara Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, Bea Cukai, Pelindo dan Garuda Indonesia sejak tahun 2018.

- g. Makin efektifnya penyebaran informasi fungsi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan sosialisasi standar mutu serta pentingnya sertifikasi mutu barang kepada pelaku usaha, khususnya eksportir dan pedagang antar pulau.
- h. Terakreditasinya laboratorium BPSMB pada awal 2011 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga hingga saat ini laboratorium BPSMB terus mempertahankan akreditasi laboratorium sehingga bisa menerbitkan sertifikat mutu barang sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan pada barang ekspor.
- i. Membaiknya kinerja Sekretariat SKPD dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pelayanan jasa administrasi perkantoran yang professional.
- j. Meningkatnya pembinaan terhadap PNS yang mendorong peningkatan disiplin dan budaya kerja kearah yang lebih baik.
- k. Membaiknya tata kelola keuangan SKPD yang ditandai dengan waktu pelayanan keuangan yang semakin cepat, efektif dan efisien.
- l. Meningkatnya jumlah SDM keuangan yang mengikuti bimtek dan diklat bagi pengelola keuangan SKPD, pelayanan adminisitrasi keuangan secara cepat dan akurat.
- m. Sistem penatausahaan keuangan lebih terkontrol dengan adanya aplikasi FMIS yang menggantikan SIMDA keuangan. Semakin intensifnya pembinaan dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo telah mendorong terciptanya penyelenggaraan keuangan yang baik dan akuntabel.
- n. Membaiknya kualitas pelaksanaan rapat koordinasi dan Forum SKPD Tingkat Provinsi Gorontalo sebagai forum perencanaan bidang Kumperindag, yang diindikasikan dengan tingkat



partisipasi stakeholder dalam forum perencanaan dan pembahasan program dan kegiatan.

- o. Membaiknya kualitas koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota baik sehingga tercipta sinergi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program/kegiatan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2022 berdasarkan target program.kegiatan yang sudah direncanakan Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2017-2022 sesuai Sasaran Strategis :

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Koperasi Sehat” dengan Indikator Kinerja Persentase Koperasi Sehat, yaitu dengan target Renstra Tahun 2022 adalah 10% dengan realisasi 34,38%. Capaian 343,8%.

Persentase Koperasi sehat di tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun buku 2022 sebanyak 252 koperasi dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT sebanyak 733 koperasi (dimana jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebanyak 985 koperasi) dikali 100 persen

2. Sasaran Strategis II yaitu “ Meningkatkan Jumlah UKM Naik Kelas” dengan indikator kinerja Rata-Rata UKM Naik kelas dengan target Renstra Tahun 2022 adalah 50 UKM dan realisasi 66 UKM. Capaian 132%.

Rata-Rata UKM Naik Kelas dihitung berdasarkan total UKM naik kelas tahun n dibagi dengan tahun n. Tahun 2022 jumlah total UKM Naik Kelas sebanyak 330 UKM dibagi tahun ke 5

3. Sasaran Strategis III “Meningkatnya Penumbuhan IKM: dengan indikator kinerja Jumlah Penumbuhan IKM. Target Renstra Tahun 2022 yaitu 50 IKM dengan capaian 212 IKM.



Indikator kinerja urusan industri “jumlah penumbuhan IKM” Tahun 2022 diperoleh dari jumlah IKM tahun n (2022) sebanyak 15.767 IKM dikurangi dengan jumlah IKM tahun (n-1) yaitu tahun 2021 sebanyak 15.555 IKM. untuk penumbuhan IKM di tahun 2022 sebanyak 212 IKM telah tercapai.

4. Sasaran Strategis IV yaitu “Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri” dengan Indikator Kinerja Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan daya Beli Masyarakat dengan target Renstra 2022 yaitu 2,15% dan capaian 0,19%.

Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli masyarakat diperoleh dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,15% dan inflasi tahun 2021 sebesar 2,59% . (*gorontalo.bps.go.id*) yaitu

$$\Delta \text{Inf} = \frac{\text{inf}(n+1) - \text{inf}(n)}{\text{inf}(n)} \times 100\%$$

5. Sasaran Strategis V “Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan” dengan Indikator Kinerja Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan dengan target Renstra 100% dan capaian Tahun 2022 sebanyak 100%. Untuk persentase barang beredar sesuai ketentuan diperoleh dari total hasil temuan yang ditindaklanjuti Tahun 2022 sebesar 91 temuan dibagi dengan total temuan yang terjadi sebesar 91 temuan di tahun 2022.

Dari analisis pencapaian sasaran program dan sasaran Dinas Kumperindag terdapat faktor keberhasilan dan faktor kegagalan yang mempengaruhi pencapaian target yaitu :

- a. Faktor Keberhasilan

Faktor External

- Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders (Pemerintah Daerah Setempat, masyarakat calon penerima manfaat dan lembaga/institusi terkait lainnya) sehingga semua permasalahan, kendala dan hambatan dapat diselesaikan



- Dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program/kegiatan
- Makin efektifnya koordinasi lintas instansi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah
- Mekanisme perbankan yang mengharuskan adanya jaminan/agunan menyebabkan KUMKM sulit untuk bisa mengakses KUR

Faktor Internal

- Upaya peningkatan kualitas SDM UMKM/IKM melalui pelatihan/bimtek dan bantuan bahan dan peralatan
- Telah terbentuk Badan penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten/Kota

b. Faktor Kegagalan

Pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kumperindag Tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

Urusan Koperasi :

1. Terbatasnya SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas yang berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
2. Minimnya jumlah kaum muda yang tertarik dengan koperasi.
3. Koordinasi antar sektor dalam hal pembinaan pengembangan dan pemberdayaan KUKM belum optimal, SDM pengelola koperasi yang sering berganti menyebabkan terhambatnya sistem manajemen dan menyebabkan realisasi pelaksanaan RAT koperasi masih sangat rendah,
4. Permasalahan internal koperasi yang sering menjadi penyebab tidak berjalannya roda organisasi adalah perselisihan antar pengurus dan pengawas, sehingga mengakibatkan tingkat pelayanan kepada anggota rendah, bahkan bisa berakibat tidak aktifnya koperasi.



5. Sulitnya untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat keberhasilan UMKM setelah menerima KUR karena tidak tersedianya data penerima KUR *by name by address* dari pihak perbankan.

Urusan UMKM

1. Perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha, pemasaran dan permodalan serta belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah besar bagi pelaku usaha. Hal ini menyebabkan UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.
2. Perkembangan kuantitas UMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan UMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), dan sistem bagi hasil.
3. Belum optimalnya basis data terpadu UMKM yang dapat mempermudah semua stakeholder dalam mengakses data UMKM yang ada di Wilayah Provinsi Gorontalo.

Urusan Industri

1. Belum semua Kabupaten/Kota mengesahkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sehingga belum ada acuan dalam pengembangan industri di Kabupaten/Kota
2. Keterbatasan bahan baku/penolong masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Sentra-sentra IKM



membutuhkan dukungan penuh bahan baku dan bahan penolong.

3. Kemampuan teknis dan jumlah SDM yang sangat terbatas serta jiwa entrepreneur dan kreativitas yang masih kurang dalam mengembangkan usaha industri kecil menengah, serta kemampuan mengembangkan desain produk serta kemasan IKM yang masih lemah
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk penunjang pengembangan IKM, serta anggaran dalam membiayai program dan kegiatan pengembangan usaha IKM juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha IKM di daerah termasuk usaha kerajinan di Provinsi Gorontalo.
5. Belum optimalnya Sistem informasi data IKM, sehingga untuk memperoleh data IKM sangat sulit.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana (mekanisasi) pendukung pengembangan industri kecil menengah serta terbatasnya kemampuan teknis, desain, produk, kemasan maupun perizinan bagi IKM
7. Industri ekonomi Gorontalo masih didominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah

Urusan Perdagangan

1. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah karena sarana dan prasarana pengawasan barang beredar masih sangat terbatas, seperti belum adanya kendaraan operasional khusus pengawasan barang dan terbatasnya anggaran untuk petugas pengawas perdagangan untuk melakukan pengawasan di Kabupaten/Kota
2. Sarana dan prasarana pengawasan barang beredar masih sangat terbatas.



3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap ketentuan peraturan yang berlaku serta keterbatasan aparat pemda sebagai pengawas barang dan jasa serta pengawas perdagangan, begitupun Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa serta Perdagangan harus lebih dioptimalkan dalam hal pembinaan sebab masih banyak pelaku usaha yang belum memahami peraturan-peraturan berlaku.
4. Keterbatasan peralatan laboratorium pengujian mutu (UPTD BPSMB) berdampak dalam pelaksanaan pengujian sehingga belum sepenuhnya mampu melaksanakan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang pada beberapa komoditi begitupun keterbatasan sarana operasional sehingga pelayanan pengujian jarak jauh sering tidak terpenuhi dan kegiatan lainnya di UPTD BPSMB terkendala.
5. Kurangnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan terutama pada pelaksanaan misi dagang yang bertujuan untuk menggenjot pertumbuhan ekspor dimana para pelaku usaha, eksportir akan mempromosikan produknya dan diharapkan terjadi transaksi dengan pembeli dari mancanegara begitupun halnya dengan dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan UKM/IKM/Pelaku Usaha agar dapat Memahami Prosedur Ekspor
6. Masih kurangnya pemahaman eksportir dalam penggunaan aplikasi E-SKA untuk penerbitan surat keterangan Asal
7. Komoditi ekspor Gorontalo masih dalam bentuk raw material dan berupa bahan baku sehingga nilai jual masih rendah
8. Komoditi yang di antarpulaukan melalui angkutan darat tidak dapat di awasi dengan baik. Selama ini data antar pulau hanya berdasarkan data Bongkat Muat Pelabuhan. Padahal banyak komoditi yang diangkut melalui darat tujuan Makassar dan Manado yang tidak dapat di awasi dengan baik



9. Keterbatasan sarana distribusi barang berupa pasar di Gorontalo. Hingga tahun 2021, jumlah pasar tradisional di Gorontalo baru 133 unit dan 14 unit pasar modern, dimana baik dari sisi jumlah, daya tampung, dan kondisi fasilitasnya masih sangat terbatas, sementara untuk pengembangan distribusi barang dan jasa sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (sesuai UU no. 23 Tahun 2014)

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah :

1. Bedah koperasi dan pembinaan koperasi harus terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah koperasi tidak aktif
2. Memberikan bantuan modal bagi koperasi baik dalam bentuk hibah kepada koperasi sesuai peraturan yang berlaku.
kebutuhan konsumen/anggota akan permodalan menyebabkan koperasi simpan pinjam yang menyediakan jasa modal maupun dana bagi anggotanya lebih diminati.
3. KUR merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu koperasi dan UMKM yang usahanya layak untuk dibiayai tetapi memiliki keterbatasan modal, sehingga perlu diberikan modal hingga batas tertentu tanpa agunan.
4. Penguatan peran KUKM, dan pelaku usaha lainnya, memacu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan PERDA tentang kemudahan investasi; peningkatan peran perbankan selaku *agent of development* guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk promosi dan pemasaran produk dan peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional dan internasional.
5. Perkembangan UMKM/IKM ini harus terus dibarengi dengan berbagai upaya untuk peningkatan usaha para pelaku usaha UMKM,



karena masih ada beberapa faktor yang harus diupayakan agar pencapaian target program akan lebih maksimal antara lain :

- Optimalisasi basis data terpadu UMKM serta ketersediaan data IKM. Dengan adanya basis data terpadu akan lebih memudahkan semua stakeholders dalam mengakses data UMKM/IKM yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.
 - Peningkatan modal usaha, masih kurangnya modal usaha serta masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha kecil untuk memformalkan usahanya melalui pengurusan perijinan, dimana hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mengakses modal perbankan
 - Peningkatan peran pendamping layanan usaha terpadu (PLUT) dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi UKM/IKM melalui Kelas Bisnis, Pelatihan dan Pendampingan walaupun dilaksanakan secara online maupun offline.
3. Dalam upaya pemulihan ekonomi daerah dan pemberdayaan serta pengembangan UMKM Pasca pandemi covid-19 menuntut Pemerintah untuk melaksanakan program-program yang sifatnya untuk mengintervensi UMKM antara lain Pemberian stimulan bagi pelaku UMKM/IKM dan wirausaha baru
 4. Meningkatkan pola pembinaan dan pemberdayaan dari tingkat hulu (petani) hingga hilir (pasar) sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya IKM di daerah
 5. Sinergitas program yang bersumber dari APBD dan APBN sangat penting sehingga proses pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM di Provinsi Gorontalo tetap berjalan dengan baik dan maksimal.
 6. Dukungan anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program kegiatan Kumperindag, pelatihan dan bimbingan teknis, pembinaan IKM serta monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan jumlah



wirausaha baru dan jumlah Usaha Mikro kecil dan UKM Naik Kelas serta stimulan bagi UMKM di Provinsi Gorontalo

7. Mengupayakan kerjasama dengan direktorat perdagangan luar negeri untuk bisa mempertemukan eksportir walau hanya dalam virtual untuk membuka peluang ekspor seperti ke Timur Tengah, Jepang kota Narita. Dan juga adanya dukungan regulasi untuk biaya form ke semua tujuan ekspor sehingga memudahkan para eksportir dalam melaksanakan ekspor. Kemudian juga adanya kerjasama dari Maskapai Garuda yang membuka rute Manado-Narita dan Makassar – Singapura sehingga biaya ekspor lebih hemat 30 % dari biaya sebelumnya
8. Monitoring perdagangan antar pulau termasuk dalam rekomendasi jangka panjang dari tim pengendali inflasi daerah (TPID), seiring dengan diterapkannya perdagangan bebas dan implementasi kerjasama antar daerah/provinsi.
9. Sinergitas Program dan Kegiatan antara APBN dan APBD lebih di tingkatkan sehingga semakin menunjang pembangunan di sektor Koperasi dan UKM
8. Kualitas koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah terus ditingkatkan sehingga diharapkan ada peningkatan terhadap alokasi anggaran Kementerian yang tersebar di 6 kabupaten/kota dan provinsi. serta DAK Non Fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yakni di khsususkan untuk Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM.
9. Kebijakan pemerintah daerah yang makin berpihak terhadap IKM, antara lain penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM serta bantuan bahan bagi IKM khususnya IKM kerajinan dan kemasan serta fasilitasi perizinan bagi IKM pangan.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja hasil program dan output kegiatan tahun 2022 dan progress 2023 diuraikan dalam *Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian*



Renstra SKPD s/d Tahun 2022 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai berikut.



*Tabel 2.10. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo (T-C.29.)*

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN KOPERASI & UKM									
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan jasa administrasi, penyediaan sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100 %	100 %	95,77 %	95,77			
	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag	Persentase Pelayanan Jasa Adminsitrase Perkantoran Dinas Kumperindag	100%	100 %	100 %	100 %	100			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana SKPD	100%	100 %	100 %	86,27 %	86,27			
	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang di latih	33 ASN	120 ASN	20 ASN	20 ASN	100			
	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB	Pesentase Pelayanan jasa administrasi kantor UPTD BPSMB	100%	100 %	%	100 %				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		100%	100 %	100 %	100 %	100			
	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program & Kegiatan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Koordinasi lintas sektor/SKPD/Pusat	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100			
		Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan SKPD	7 Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100			
	Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50			
	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	- Jumlah Koperasi Aktif	728 Koperasi Aktif	957 Koperasi Aktif	728 Koperasi Aktif	985 Koperasi Aktif	135,3022			
		- Jumlah Koperasi berkualitas/	10 Kop. Berprestasi	10 Koperasi	10 Koperasi	20 Koperasi	200			
		- Jumlah Koperasi berprestasi		10 Koperasi	10 Koperasi	20 Koperasi	200			
	Penguatan SDM dan kelembagaan Koperasi	jumlah pengurus & pengelola koperasi yang ditingkatkan pemahaman- nya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan	690 pengurus dan pengelola koperasi yang dilatih	390 pengurus dan pengelola yang dilatih	150 pengurus dan pengelola yang dilatih	390 pengurus dan pengelola yang dilatih	260			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Revitalisasi Koperasi	30 koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	7 Koperasi	140			
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	27 dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	12 dokumen	171,42857			
		jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & di latih	1 tim satgas (7 satgas)	1 satgas (provinsi)	1 satgas (provinsi)	1 satgas (provinsi)	100			
		jumlah koperasi berprestasi & Koperasi Percontohan	50 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	20 koperasi	200			
		Jumlah pemeriksaan ksp/usp	30 koperasi	10	10 Koperasi	12 koperasi	120			
	Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses Permodalan	5000 KUKM	1.250 KUKM	1500 KUKM	4.867 KUKM	324,46667			
	Pembiayaan Bagi KUKM	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kredit Perbankan	12 kali	6 Kali	0 Kali	6 Kali				
	Pengembangan Layanan Usaha KUKM **	jumlah KUKM yang difasiltasi pendampingan usaha oleh PLUT KUKM	400 KUKM	0 KUMKM	0 KUKM	0 KUMKM				
	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas	250 UKM	75 UKM	50 UKM	75 UKM	150			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UKKM	jumlah UKM yang di tingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktifitas dan pemasaran	850 UKM	75 UKM	200 UKM	67 UKM	33,5			
			30 UKM yang dimagangka n	0 UKM Yang Dimagangk an	6 UKM Yang Dimagangkan	0 UKM Yang Dimagang- kan	0			
	Pembinaan UMKM Naik Kelas	Jumlah UMKM yang di bina	250 UKM	75 UKM	50 UKM	75 UKM	150			
	Lomba Inovasi /UMKM Model dan Percontohan daerah	Jumlah UMKM Model/Percontohan		0 UKM Model	- UKM Model	0 UKM Model	0			
	Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UKM/IKM	Jumlah UKM /IKM yang mengikuti temu mitra	1000 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	0 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	- UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	0 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	0			
	Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Jumlah Produk UKM/IKM yang di Promosikan/dipasarkan di dalam & luar daerah	80 Produk UKM/IKM	20 produk UKM/IKM	20 produk UKM/IKM	35 produk UKM/IKM	175			
	Pengembangan Usaha Layanan PLUT **	Jumlah KUKM yang difasilitasi pendampingan usaha oleh PLUT KUKM	400 KUKM							
	(keg. Menjadi sub kegiatan pada Keg Pembinaan UMKM Naik Kelas)									



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN INDUSTRI									
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang Dibina	15.339 IKM	15.393 IKM	15.33 9 IKM	15.60 5 IKM	101,73			
	Pengembangan Agro Industri & Industri Pangan Daerah	jumlah IKM yang terampil tentang pengolahan pangan	140 IKM yang mendapat Bimtek/ Bantuan Pengolahan Pangan	64 IKM yang mendapat Bimtek Pengolaha n Pangan	50 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	68 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	136,00			
	Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka	Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Penguasaan Teknologi	240 IKM KIMIA Kerajinan, Sandang dan Aneka yang Dibina	83 IKM yang mendapat Bimtek/ban tuan Kerajinan	70 IKM yang mendapat Bimtek/bantu an Kerajinan	97 IKM yang mendapat Bimtek/ bantuan Kerajinan	138,57			
	Pengembangan Agro Industri Terpadu	Jumlah Industri AgroTerpadu		- Ton	0 Ton Ton	- Ton				
	Pengembangan Industri Kerajinan Daerah	Jumlah IKM berbasis Industri Kerajinan		(Di Pindahkan ke keg Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka)	IKM yang mendapat bimtek/bantu an kerajinan	(Di Pindahkan ke keg Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka)				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan Teknologi Industri Logam dan Mesin	Jumlah IKM di bidang logam, mesin dan elektronik yang dibina penguasaan teknologi	120 IKM Logam mesin & Elektronik Yang Dibina	20 IKM Logam Mesin & Elektronik yang dibina	20 IKM Logam Mesin & Elektronik yang dibina	47 IKM Logam Mesin & Elektronik yang dibina	235,00			
	Pengembangan Sistem Informasi IKM	Data Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	0 Sistem Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	0 Sistem Informasi IKM	0			
	Pengembangan Agro Industri Terpadu	Jumlah Industri Agro Terpadu	1 Industri Agro Terpadu	0 Industri Agro Terpadu	1 Industri Agro Terpadu	0 Industri Agro Terpadu	0			
	URUSAN PERDAGANGAN									
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah	Jumlah ekspor	12 Komoditi	10 Komoditi	12 Komoditi	11 Komoditi	91,666667			
	Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor Daerah	Jumlah Komoditi produk ekspor yang dipromosikan	10 komoditi	3 Komoditi	10 Komoditi	14 Komoditi	140,00			
		Jumlah UKM yang Memahami Prosedur export	20 calon eksportir	30 calon eksportir	20 calon eksportir	9 calon eksportir	45			
		Misi Dagang Ekspor dan Antar Pulau	1 misi dagang	0 misi dagang	1 misi dagang	1 misi dagang	0			
	Program Pengembangan dan Pengamanan	Jumlah Perdagangan antar Pulau	3308 Kali	3808 Kali	3600 Kali	4033 Kali	112,03			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perdagangan dalam Negeri									
	Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Operasi Pasar	3600 kali Operasi Pasar	25 Kali Operasi Pasar	150 Kali Operasi Pasar	33 Kali Operasi Pasar	22,00			
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pelaku Usaha yang di awasi	120 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	109,09			
	Penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen	80 kasus	96 Kasus	80 Kasus	91 -	114			
	Peningkatan Standardisasi Mutu Barang	Jumlah Sertifikat Mutu Barang	15 Sertifikat	0 sertifikat	3 Sertifikat	12 sertifikat	400			
	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah Pengujian standar Mutu Barang	3500 Kali	692 Kali	1200 Kali	1051 Kali	87,58			
	Penerapan Standardisasi Mutu Barang	Pelaku Usaha UKM yang menerapkan Standar Mutu Barang	123 Pelaku Usaha	32 pelaku usaha	30 pelaku usaha	52 pelaku usaha	173,33			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN									



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PELAYANAN DASAR									
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan						100 %	59	100
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah						10 Dokumen	6	100
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan						87 Orang/ Bulan	52	100
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan						87 Orang	97	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan						30 paket	19	100
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1 Laporan	0,5	100
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat						20 Koperasi		100
2.17.03.1.01	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi						20 Dokumen		100
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya						390 Orang		100
2.17.05.1.01	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						390 Orang		100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif						15 Unit Usaha		100
2.17.06.1.01	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						15 Unit Usaha		100
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing						60 Unit Usaha		100
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya						200 Unit Usaha		100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan									
2.17.8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha						20 Unit Usaha		100
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah						30 Unit Usaha		100
2.17.08.1.01. 01	Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi						30 Unit Usaha		100
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN									



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	BIDANG PERDAGANGAN									
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi Perusahaan						1 Dokumen		100
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Ska Dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						8 Dokumen		100
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						20 Laporan		100
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam						12 Laporan		100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5		6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Sistem Informasi Perdagangan									
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya							12 Laporan		100
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor							6 Komoditi		100
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu)	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi							6 Pelaku Usaha		100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5		6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi										
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen							5 Dokumen		100
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen							10 Kasus		100
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk							103 Dokumen		100
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi							30 Pelaku Usaha		100
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5		6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri							1 Dokumen		100
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							1 Dokumen		100
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi							1 Dokumen		100
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi							1 Dokumen		100
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pengelolaan sistem Informasi Industri Yang tersedia							1 Dokumen		100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021		Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan 2023 (RENJA OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)				Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5		6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							13 Dokumen		100



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag

Analisis kinerja pelayanan SKPD dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sesuai target Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2017 – 2022 yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo (T-C. 30)

No	Indikator	SPM/ Std Nas	IKK	Kondisi Awal Tahun 2017		Target Renstra SKPD					Realisasi & Perkiraan Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Target	Realisasi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
Pelayanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
1	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																	
1	Jumlah Koperasi Aktif			658 Koperasi	717 Koperasi	668 Koperasi	678 Koperasi	693 Koperasi	708 Koperasi	728 Koperasi	840 Koperasi	866 Koperasi	907 Koperasi	957 Koperasi	985 Koperasi			
2	Jumlah Koperasi Aktif															15 Koperasi	20 Koperasi	
3	Jumlah Koperasi Sehat															20 Koperasi	20 Koperasi	
4	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya															390 orang	390 orang	
5	Jumlah UMKM Yang Dibina/Naik Kelas			20 UKM	20 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	60 UKM	70 UKM	50 UKM	75 UKM	75 UKM			
6	Jumlah UKM Yang Berdaya Saing															100 Unit usaha	140 Unit usaha	
7	Jumlah UKM yang Bertransformasi Usaha															30 unit usaha	40 unit usaha	
Pelayanan Urusan Pilihan																		
II	Perdagangan																	
8	Jumlah perdagangan antar pulau			2400 Kali	2400 Kali	2640 Kali	2880 Kali	3120 Kali	3360 kali	3600 kali	3033 Kali	3.308 kali	3553 kali	3808 kali	4033 kali			



No	Indikator	SPM/ Std Nas	IKK	Kondisi Awal Tahun 2017		Target Renstra SKPD					Realisasi & Perkiraan Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Target	Realisasi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
9	Jumlah Ekspor			6 Komoditi	6 Komoditi	7 Komoditi	8 Komoditi	9 Komoditi	10 Komoditi	12 Komoditi	7 Komoditi	8 komoditi	13 komoditi	10 komoditi	11 Komoditi			
10	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang			3 sertifikat	12 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	3 Sertifikat	3 Sertifikat	3 Sertifikat	- Sertifikat	8 Sertifikat	- Sertifikat	12 sertifikat			
11	Jumlah perusahaan yang Difasilitasi dan diawasi															2 Dokumen	2 Dokumen	
12	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting															28 Laporan	28 Laporan	
13	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor															6 Komoditi	7 Komoditi	
14	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen															5 Dokumen	7 Dokumen	
III	Perindustrian																	
15	Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang dibina			14.339 IKM	14.025 IKM	14.539 IKM	14.739 IKM	14.939 IKM	15.139 IKM	15.339 IKM	14.886 IKM	15.000 IKM	15.226 IKM	15.555 IKM	15.605 IKM			
16	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri															36 Dokumen	36 Dokumen	
17	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi															1 Dokumen	1 Dokumen	
18	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri															12 Dokumen	12 Dokumen	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pergub Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Kumperindag sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kumperindag memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi dan Perdagangan;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; serta
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Koordinasi dan Sinergi Program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yang menjadi

kewenangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan faktor eksternal yang ada diluar kewenangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo seperti Dinamika Nasional, Regional/Lokal dan sebagainya. Koordinasi dan sinergi program antar perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan kementrian/lembaga di tingkat nasional dilakukan dengan diselenggarakannya Rakortekbang dengan usulan-usulan dari daerah dengan memperhatikan pengaturan dan penjabaran tugas dan fungsi masing-masing opd dan kewenangannya dan berdasarkan urusan yang apa yang menjadi kewenangan.

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian kinerja dan pelayanan, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan atau hambatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan OPD sangat terkait dengan beberapa isu penting baik internal maupun eksternal, antara lain :

Isu-isu Internal :

1. Kualitas SDM aparatur. Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, karena ketersediaan SDM yang memiliki skil, keahlian dan pengetahuan terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kualitas kebijakan dan pelayanan publik OPD. Kondisi SDM Dinas Kumperindag relatif cukup tersedia, berpengalaman, ahli dibidangnya dan memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Jabatan fungsional yang ada belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang digeluti dimana pejabat fungsional masih bekerja rangkap antara tugas struktural dan fungsional. Bimtek peningkatan SDM bagi pejabat fungsional belum tersedia.
2. Iklim dan budaya kerja yang terbangun dilingkungan OPD. Ini merupakan salah satu faktor pendorong (positif) atau justru sebaliknya menjadi penghambat (negatif) dalam pencapaian kinerja OPD. Sejauh ini iklim dan budaya kerja dilingkungan Dinas Kumperindag cukup kondusif dalam mendukung pencapaian kinerja OPD, meskipun belum sepenuhnya optimal.



3. Sarana dan prasarana pendukung. Kedudukan sarana dan prasarana hampir sama pentingnya dengan ketersediaan SDM yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Dinas Kumperindag masih sangat terbatas. Ruang kerja yang belum representative, ketersediaan peralatan laboratorium di UPTD BPSMB serta kendaraan operasional UPTD BPSMB
4. Koordinasi internal lintas Sub Dinas (Subdin) dalam OPD. Koordinasi merupakan sarana komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Koordinasi yang terbangun di lingkungan Dinas Kumperindag telah optimal, terutama dalam hal sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Nuansa ego sektoral tidak sampai pada level kritis yang bisa menghambat pencapaian kinerja OPD.
5. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan money program lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara umum koordinasi yang terbangun relatif semakin baik, meskipun belum optimal.

Isu-isu Eksternal :

Isu-isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi, Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan, Peningkatan Kualitas SDM KUKM, Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi.
- d. Perluasan akses pembiayaan koperasi masih terbatas.
- e. Permodalan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya



Tantangan dalam pengembangan Koperasi UKM adalah :

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional
- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan system manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMKM masih rendah menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan serta bantuan bahan peralatan yang dibutuhkan bagi pengembangan usaha para pelaku UMKM dan wirausaha baru.

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas,



serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet serta belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain masih sedikit UKM yang naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini.

Isu Strategis di Bidang Perindustrian adalah Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan baik dalam bentuk bahan baku produksi, peralatan, Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional, Pengembangan sentra dan kluster industri di daerah dan Penetapan Rencana Kawasan Industri Terpadu serta belum sinerginya seluruh stakeholder dalam pengembangan industri di wilayah Kabupaten/Kota baik antara OPD Kabupaten/Kota, provinsi, swasta, perbankan, dll,

Isu strategis di bidang perdagangan adalah

- a. Stabilisasi harga melalui Pelaksanaan operasi pasar, ketersediaan Bahan pokok dan barang penting
- b. Pengendalian inflasi
- c. Pengawasan distribusi pupuk
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen,
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan,
- f. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku usaha ekspor
- g. Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Standar
- h. Belum baiknya system distribusi barang dan jasa
- i. Masih rendahnya akses pasar luar negeri.

Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.



- j. Belum membaiknya sistem distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi),
- k. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen,
- l. Terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi.
- m. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi.
- n. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
- o. Keterbatasan anggaran berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan di OPD sehingga target kinerja tidak optimal

Isu Strategis di bidang Pelayanan SKPD adalah

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi,
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD.

Beberapa isu-isu penting tersebut diatas merupakan tantangan sekaligus peluang yang menjadi *starting point* sekaligus dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun berikutnya.

Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan

Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan adalah :



- a. Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan baik dalam bentuk bahan baku produksi, peralatan, Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional
 - b. Stabilisasi harga melalui Pelaksanaan operasi pasar, ketersediaan Bahan pokok dan barang penting, Pengendalian Inflasi
 - c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi
 - d. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen
- Berdasarkan isu-isu penting tersebut maka dalam penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan sehingga perlu disusun pola dan rencana yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan Kumperindag.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 yang sebelumnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025. RKPD tahun 2024 menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) tahun 2024.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).



Rencana Kerja Pembangunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Kumperindag berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Diskumperindag periode 2023-2026 yang telah disusun dan direview atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kumperindag merupakan kebutuhan dan menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.

Untuk tahun 2024, rencana pembangunan pemerintah pusat mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan penguatan pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Adapun rencana pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tema “Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik”, dengan 4 (Empat) Unsur Tema sebagai penjabarannya, yakni:

- Peningkatan Ekonomi;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo, maka ditetapkan tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun 2024 adalah: *“Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Infrastruktur Dasar dan Strategis, serta Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah”*”.

Mengacu pada fokus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, serta tema RKPD Tahun 2024 maka kebijakan utama/prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan,



industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan meminimalisir bencana.

2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan

Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi

Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

Sebagai aktualisasi terhadap tema pembangunan daerah Tahun 2024, maka ditetapkanlah program dan kegiatan prioritas OPD dalam Rancangan RKPD Tahun 2024. Adapun hasil perbandingan antara program dan kegiatan dalam Rancangan RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja Dinas Kumperindag Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program kegiatan pada Renja Tahun 2024 adalah program kegiatan dalam upaya pencapaian target yang terdapat pada Renstra Tahun 2023-2026 dan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmen 050 tahun 2020 dengan indikator pada RKPD dan Renstra OPD. Nomenklatur program pada tahun 2024 mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan yang terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pada Renja Rancangan Awal 2024 terdiri atas 13 Program, 21 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, sama seperti yang tercantum pada RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
3. Besaran anggaran pada RKPD 2024 sebesar Rp. 29.716.135.532,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) termasuk gaji dan tunjangan serta DAK Non Fisik. Anggaran ini sama dengan besaran anggaran pada Renja Tahun 2023.
4. Pada belanja gaji dan tunjangan PNS tahun 2024 senilai Rp. 9.287.670.357,- turun dari besaran gaji dan tunjangan PNS tahun 2023 senilai Rp. 9.525.980.913,- karena telah dilakukan rasionalisasi berdasarkan hasil evaluasi realisasi gaji tahun 2022 dimana belanja gaji dan tunjangan PNS terdapat selisih sejumlah Rp, 315.766.746,-
5. Adapun khusus Untuk Anggaran pelaksanaan Program Kegiatan termasuk DAK Non Fisik sebesar Rp. 20.428.465.175,- (dua puluh milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Dimana anggaran ini telah melalui proses review Bappeda dan pembahasan bersama Bappeda. Adapun anggaran DAK Non Fisik tahun 2024



sebesar Rp. 2.021.583.000,- sama dengan alokasi anggaran DAK Non Fisik tahun 2023.

6. Dalam upaya pengendalian inflasi dan mendukung kebijakan Pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, daya beli masyarakat serta stabilitas perekonomian di daerah maka pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi ditahun 2024 diupayakan untuk meningkat anggarannya berdasarkan evaluasi tahun 2023 dimana anggaran untuk penyelenggaraan operasi pasar mengalami kenaikan karena intensitas pelaksanaan pasar murah yang meningkat terutama menjelang HBKN dan adanya lonjakan harga. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia maka anggaran untuk pelaksanaan operasi pasar di Tahun 2024 belum maksimal.
7. Pada Renja 2024 terdapat perubahan Nomenklatur sub kegiatan dibanding tahun 2023 yaitu :



Tahun 2023						Tahun 2024					
Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	2	17	03	1.01	02	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	3	30	06	1.02	06	Pemantauan Mutu Produk
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3	31	03	1.01	04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)



Untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Tahun 2024, maka dilakukan review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang tertuang dalam tabel 2.12 tentang rencana program dan kegiatan prioritas Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Tabel 2.12 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

Kode			Rancangan Akhir RKPD						Rancangan Akhir RENJA					
			Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	14.829.681.857	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	14.829.681.857
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	190.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	190.000.000
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	1.557.878.700	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	1.557.878.700
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Aktif	20	Unit Usaha	2.270.294.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Aktif	20	Unit Usaha	2.270.294.400
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang berdaya saing	140	Unit Usaha	1.725.287.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang berdaya saing	140	Unit Usaha	1.725.287.800
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40	Unit Usaha	1.604.846.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40	Unit Usaha	1.604.846.000



Kode			Rancangan Akhir RKP						Rancangan Akhir RENJA					
			Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2	Dokumen	149.071.200	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2	Dokumen	149.071.200
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Laporan	1.678.028.275	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Laporan	1.678.028.275
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	7	Komoditi	394.596.350	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	7	Komoditi	394.596.350
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7	Dokumen	3.178.598.400	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7	Dokumen	3.178.598.400
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen	1.851.875.100	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen	1.851.875.100
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dokumen	91.900.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dokumen	91.900.000
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Provinsi Gorontalo	Jumlah Informasi Industri & fasilitas Pengolahan Data Industri	12	Dokumen	194.077.450	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Provinsi Gorontalo	Jumlah Informasi Industri & fasilitas Pengolahan Data Industri	12	Dokumen	194.077.450
			Total					29.716.135.532	Total					29.716.135.532



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian tentang proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

Dalam rangka perumusan program dan kegiatan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024, telah dilaksanakan forum perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, baik Kementerian/Lembaga, SKPD Kabupaten/Kota, pelaku UMKM dan IKM. Forum perencanaan dimaksud antara lain Forum SKPD Bidang Kumperindag Tingkat Provinsi Gorontalo. Forum SKPD Tingkat Provinsi Gorontalo dan Rakortek Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024.

Berbagai usulan stakeholder yang disampaikan dalam forum perencanaan tersebut telah ditampung, diolah dan disesuaikan nomenklaturnya untuk kemudian dituangkan kedalam usulan program dan kegiatan Renja 2024.

Proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, yakni ;

- a. Usulan masyarakat diajukan langsung pada saat kunjungan kerja Gubernur, Sekda, Reses Anggota DPRD dan Kunjungan Kerja Kepala Dinas Kumperindag ke lapangan, disamping itu usulan masyarakat melalui proposal tertulis yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan Camat maupun LSM, organisasi masyarakat dan juga oleh masyarakat itu sendiri.
- b. Usulan-usulan masyarakat yang paling banyak adalah;
 1. Permohonan Bantuan bagi UMKM/IKM berupa bahan, peralatan, rumah produksi, kemasan dan perizinan
 2. Pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten/Kota se Prov. Gorontalo
 3. Peingkatan kapasitas pengelola koperasi melalui Bantuan Modal Koperasi, Revitalisasi Koperasi
 4. Pembentukan Koperasi
 5. Penyelesaian Sengketa Konsumen



Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;

- Peningkatan kualitas SDM UKM/IKM (industri kecil menengah) dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan baik dalam bentuk bahan baku produksi, peralatan, Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional
- Stabilisasi harga melalui Pelaksanaan operasi pasar, ketersediaan Bahan pokok dan barang penting, Pengendalian Inflasi dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
- Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas dan Kelembagaan Koperasi
- Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi
- Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen
- Upaya Pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing UMKM/IKM

Kondisi

Kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pada prinsipnya berbagai usulan yang masuk baik dari badan, lembaga, dinas dan masyarakat semua dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan kesesuaian tugas dan tanggung jawab atau tugas dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan dikelompokkan kedalam kewenangan penanganan lalu disusun berdasarkan skala prioritas dengan melakukan peninjauan kelapangan atau pengecekan untuk melihat tingkat urgensi dan kendala. Setelah diperoleh dokumen yang sudah layak untuk diprogramkan atau sudah memiliki data dukung lalu dimasukkan dalam program pelaksanaan melalui Musrenbang atau program lainnya. Untuk kegiatan yang sifatnya segera atau mendesak maka akan diproses melalui mekanisme kegiatan kebencanaan/program tanggap darurat



*Tabel 2.13 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo*

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
2 17 03 1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	Kegiatan ini diusulkan untuk penilaian koperasi berprestasi di Kab/Kota
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2 17 05 1.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	390 Orang	Kegiatan ini diusulkan untuk pembinaan dan revitalisasi koperasi
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	29 Unit Usaha	Kegiatan ini diusulkan sebagai upaya perluasan akses pasar & pembiayaan bagi KUKM
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2 17 07 1.01 0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	250 Unit Usaha	Kegiatan ini diusulkan untuk pemberdayaan UMKM & Peningkatan Daya Saing UMKM
2 17 07 1.01 0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	318 Orang	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				
2 17 08 1.01 0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	Untuk Pengembangan UMKM & Peningkatan Daya Saing UMKM
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
3 30 02 1.02	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				
3 30 02 1.02 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	9 Dokumen	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
3 30 04 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3 30 04 1.02 0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	
3 30 04 1.02 0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	Kegiatan ini diusulkan untuk stabilisasi harga dan pengendalian inflasi
3 30 04 1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				
3 30 04 1.03 0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
3 30 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				
3 30 05 1.01 0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
3 30 06 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6 BPSK	Kegiatan ini diusulkan untuk penyelesaian sengketa konsumen
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	Kabupaten/ Kota	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 Komoditi	
3 30 06 1.02 02	Pengembangan Layanan Pengujian	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	100 Dokumen	
3 30 06 1.02 03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan Barang	2 Sertifikat	
3 30 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	Kegiatan ini diusulkan untuk pemberdayaan, pembinaan, fasilitasi bagi IKM
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	Kegiatan ini diusulkan untuk pemberdayaan, pembinaan, fasilitasi bagi IKM
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12 Dokumen	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
3 31 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan				



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				
3 31 03 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Dokumen	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
3 31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
3 31 04 1.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten/ Kota	Data Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	Pemenuhan data IKM

BAB III

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Kumperindag melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Diskumperindag diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;



2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. RPD 2023-2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025. Periode akhir dalam tahapan RPJPD sangat penting dalam mewujudkan visi jangka panjang Gorontalo 2007-2025, yaitu **Gorontalo Maju dan Mandiri**. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta fokus-fokus pembangunan utama yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan ekonomi Gorontalo yang handal
2. Mewujudkan sumberdaya manusia Gorontalo yang handal
3. Mewujudkan pemerintahan daerah Gorontalo yang amanah

Adapun permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi



2. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
3. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
4. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM.
5. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan
6. Masih perlunya peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional
7. Masih perlunya pengembangan sentra dan kluster industri di daerah, untuk meningkatkan jumlah dan investasi dibidang industri
8. Belum ada kawasan Industri terpadu di Provinsi Gorontalo
9. Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
10. Tingginya Biaya Logistik
11. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait BPSK
12. Kurangnya intensitas pengawasan kegiatan perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
13. Kurangnya fasilitas pengembangan produk potensial daerah
14. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur ekspor
15. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium dan operasional BPSMB
16. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Dinas Kumperindag
17. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD
18. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
19. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan kegiatan SKPD.
20. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.



Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan :

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional
- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan masih bergelut pada masalah seperti :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.

- d. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta langkah-langkah perluasan/pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Salah satu prakarsa baru sebagai pengungkit (*leverage*) bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025.

Sejalan dengan MP3EI tersebut maka kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*), memperluas lapangan kerja (*pro-job*), menanggulangi kemiskinan (*pro-poor*) serta merespon persoalan-persoalan perubahan iklim (*pro-environment*). Aktualisasi dari kebijakan nasional tersebut antara lain :

1. Sasaran pembangunan industri nasional adalah peningkatan pertumbuhan industri pengolahan non migas. Untuk itu kebijakan industri untuk tujuan jangka pendek diarahkan pada pengamanan pasar domestik dari produk impor serta berbagai upaya harmonisasi tarif. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang diarahkan pada revitalisasi industri, penumbuhan klaster industri berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan industri untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang difokuskan pada: (1) Revitalisasi industri, khususnya industri pupuk, industri gula, dan revitalisasi berbagai rumpun (*cluster*) industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional; dan (2) Penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (*oleochemical*) serta rumpun industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi.



2. Sasaran perdagangan internasional adalah meningkatnya angka pertumbuhan ekspor, dalam rangka meningkatkan akses pasar, Indonesia melakukan *multitrack strategy*, yaitu strategi diplomasi di fora multilateral, regional, dan bilateral, Melalui *multitrack strategy* ini. Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, dan NAMA 11, di forum ASEAN, ASEAN – Mitra dan Sub Regional ASEAN serta forum Bilateral.
3. Sasaran perdagangan dalam negeri adalah memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (*locally integrated. internationally connected*). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) logistik.
4. Sasaran pembangunan koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo 2023-2026 adalah :
 - a. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat Mandiri dan Maju
 - b. Mewujudkan UMKM Naik kelas yang Berdaulat dan Mampu bersaing di pasar domestik dan global
 - c. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif
 - d. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan
 - e. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM
 - f. Mewujudkan profesionalisme aparatur sipil negara
 - g. Mewujudkan sistem data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi
 - h. Mewujudkan tata kelola pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang baik



Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut diatas. maka kebijakan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi
2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha.
3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
4. Fasiltasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM
5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia
6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)
7. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041
8. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri
9. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital
10. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting
11. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspo
12. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri
13. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program/kegiatan dan pagu indikasi. Dalam pelaksanaannya, Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 akan menjadi pedoman bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan OPD Kabupaten/Kota terkait dalam merumuskan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD),

Indikator Kinerja Sasaran :

- d. Jumlah Koperasi Berkualitas
- e. Jumlah UKM yang berdaya saing
- f. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah
- p. Jumlah Nilai Ekspor

Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan

Indikator Kinerja Sasaran :

Nilai SAKIP

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Nomenklatur program pada tahun

2024 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Sebagai aktualisasi dari Renstra 2023-2026 dan RKPD 2024 maka program dan kegiatan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja hasil program dan output kegiatan secara langsung mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.
2. Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam misi RPJPD 2007-2025. meliputi :
 - a. Mewujudkan ketahanan ekonomi Gorontalo yang handal;
 - b. Mewujudkan sumberdaya manusia Gorontalo yang handal; dan
 - c. Mewujudkan pemerintahan daerah Gorontalo yang amanah
3. Program dan kegiatan Dinas Kumperindag Tahun 2024 merujuk pada RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024
4. Rumusan program dan kegiatan Dinas Kumperindag Tahun 2024 memiliki relevansi dalam pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi daerah , peningkatan daya saing UMKM dan penurunan angka kemiskinan. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan ini,



aktifitas kegiatan Dinas Kumperindag saling berkolaborasi dengan pelaksanaan kegiatan pada OPD lainnya

5. Program dan kegiatan Dinas Kumperindag merupakan bagian integral dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah. yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, industri pengolahan, koperasi dan UMKM sebagai sektor riil penggerak ekonomi daerah.
6. Program dan kegiatan Dinas Kumperindag dititikberatkan pada upaya pemulihan ekonomi daerah, peningkatan daya saing UMKM dampak pandemic covid-19

Berikut diuraikan perbandingan program, kegiatan dan anggaran APBD T.A. 2023 dan Renja rancangan akhir OPD Tahun 2024.

Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Program Kegiatan dan Anggaran

URAIAN	JUMLAH			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
APBD T.A. 2023 (Termasuk DAK)	13	21	28	26.207.354.748
APBD TA. 2023 (Termasuk DAK)	13	21	28	26.207.354.748

Tabel 3.2. Perbandingan Program. Kegiatan dan Anggaran RKPD dan Renja 2024

URAIAN	JUMLAH			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
RKPD 2024 (Termasuk DAK)	13	21	28	29.716.135.532
RENJA 2024 (Termasuk DAK)	13	21	28	29.716.135.532



Berdasarkan masukan dan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Program dan Kegiatan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2024 dan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD 2026
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
(Terlampir => sumber SIPD)**



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Program Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag. Rencana program prioritas, target beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026, selanjutnya dijabarkan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dalam upaya pencapaian target RPD 2023-2026.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan, Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo.



Adapun program/kegiatan Dinas Kumperindag dan Pendanaannya
Tahun 2024 sebagai berikut :

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.177.988.757
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			22.177.988.757
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100%	14.829.681.857
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10 Dokumen	1.100.326.000
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	575.100.000
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	525.226.000
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	87 Orang/ Bulan	9.437.845.357
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	9.287.670.357
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150.175.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87 Orang	515.402.000
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	515.402.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	31 Paket	1.995.658.400
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1.995.658.400
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1.780.450.100
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.780.450.100
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20 Koperasi	190.000.000
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20 Dokumen	190.000.000
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	190.000.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390 Orang	1.557.878.700



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390 Orang	1.557.878.700
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	390 Orang	1.557.878.700
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	20 Unit Usaha	2.270.294.400
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	2.270.294.400
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	2.270.294.400
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	140 Unit Usaha	1.725.287.800
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	250 Unit Usaha	1.725.287.800
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	250 Unit Usaha	918.776.450
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	318 Orang	806.511.350
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40 Unit Usaha	1.604.846.000
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	40 Unit Usaha	1.604.846.000
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	1.604.846.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.538.146.775
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			5.400.294.225
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2 Dokumen	149.071.200
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	9 Dokumen	149.071.200



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	9 Dokumen	149.071.200
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28 Laporan	1.678.028.275
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	16 Laporan	1.539.218.050
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	128.223.300
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	1.410.994.750
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	12 Laporan	138.810.225
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	138.810.225
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	7 Komoditi	394.596.350
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	7 Pelaku Usaha	394.596.350
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	7 Pelaku Usaha	394.596.350
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7 Dokumen	3.178.598.400
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	11 Kasus	2.234.914.700
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6 BPSK	2.234.914.700
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	153 Dokumen	735.809.600
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	150 laporan	448.435.700
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	3 Produk	133.156.000
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan	Jumlah Sertifikat	3 Sertifikat	154.217.900



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan		
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	40 Pelaku Usaha	207.874.100
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	207.874.100
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.137.852.550
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36 Dokumen	1.851.875.100
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36 Dokumen	1.851.875.100
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	698.003.700
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	968.307.900
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12 Dokumen	185.563.500
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1 Dokumen	91.900.000
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1 Dokumen	91.900.000
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA	1 Dokumen	91.900.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12 Dokumen	194.077.450
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	194.077.450
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	194.077.450
TOTAL				29.716.135.532



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Rancangan Akhir Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RKPD Rancangan Akhir Provinsi Gorontalo 2023 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Dimana RPD 2023-2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daetah (RPJPD) 2007 -2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 – 2025, yaitu **Gorontalo Maju dan Mandiri**.

Selanjutnya diuraikan kedalam tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan dioperasionalkan melalui program dan kegiatan tahunan untuk selang waktu 2023 - 2026.

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo akan melaksanakan 13 Program, 21 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu pada Rancangan Renja 2024 senilai Rp. 29.716.135.532 Jumlah Pagu ini sama dengan besaran pagu pada RKPD 2024.

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kumperindag Tahun 2024 memiliki relevansi dalam pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi daerah , peningkatan daya saing UMKM dan penurunan angka kemiskinan. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan ini, aktifitas kegiatan Dinas Kumperindag saling berkolaborasi dengan pelaksanaan kegiatan pada OPD lainnya

Dengan memperhatikan uraian pada Bab-bab sebelumnya, dan mempertimbangkan situasi terkini beserta peluang dan tantangan kedepan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo akan semakin berat. Karena di satu sisi, masih banyak



permasalahan yang harus diselesaikan dan dibenahi. Sedangkan disisi lain, ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sangat terbatas, baik SDM, sarana prasarana dan pendanaan.

Menghadapi situasi tersebut. maka perlu dikembangkan langkah-langkah strategis guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, yang juga sekaligus bisa menutupi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga roda pembangunan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Langkah-langkah strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran SKPD dengan Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, sehingga dengan sinergi tersebut akan tercipta efisiensi sumberdaya namun tetap memiliki daya dorong yang kuat terhadap peningkatan kinerja sektor Koperasi, UMKM, Perippndustrian dan Perdagangan di daerah.
2. Mendorong partisipasi dan peran aktif sektor swasta dan BUMN dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan lingkup aktifitas dengan proporsi yang berimbang, sehingga partisipasi tersebut disamping meringankan tugas dan tanggungjawab SKPD, juga akan menghasilkan nilai tambah bagi usahanya dan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan instansi vertikal terkait perbankan. asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga donor, dan organisasi lainnya dalam rangka pemberdayaan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di daerah.
4. Penyempurnaan organisasi, revitalisasi program dan kegiatan serta indikasi anggaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo harus senantiasa diselaraskan dengan dinamika terkini dan proyeksi perkembangan pembangunan selang waktu 2023-2026
5. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program/keghiatan terutama kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah



melalui pengembangan dan pemberdayaan KUKM/IKM, pengendalian inflasi daerah

6. Ketersediaan Data UKM/IKM sangat dibutuhkan untuk membackup kegiatan yang akan di usulkan dan menjadi prioritas daerah
7. Penyediaan fasilitas sarana prasarana penunjang untuk Laboratorium pengujian pada Balai Pengujian Standarisasi Mutu Barang (BPSMB)

Semoga Dokumen Renja ini bisa menjadi pedoman dalam perencanaan. pelaksanaan. monitoring evaluasi serta sarana sinkronisasi program pusat, Provinsi, Kabupaten/Klota sekaligus menjadi alat ukur pencapaian kinerja Tahun 2023 dan RPD Tahun 2023 – 2026.

Gorontalo. Juli 2023
KEPALA DINAS

RISION SUNGE

NIP. 19690924198902 1 001